

**PEMANFAATAN RENCANA STRATEGIS KOTA DALAM
PENYUSUNAN USULAN PROGRAM PEMBANGUNAN
KOTA TANJUNGPINANG**

TESIS

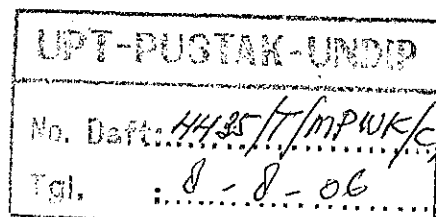
Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Studi Magister Pembangunan Wilayah dan Kota

Oleh :

**SOEDJARWOTO S.
L4D003107**



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2005**



**PEMANFAATAN RENCANA STRATEGIS KOTA DALAM PENYUSUNAN
USULAN PROGRAM PEMBANGUNAN KOTA TANJUNGPINANG**

Tesis diajukan kepada
Program Studi Magister Pembangunan Wilayah dan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

Oleh:

SOEDJARWOTO S.
L4D003107

Diajukan pada Sidang Ujian Tesis
Tanggal 23 Desember 2005

Dinyatakan Lulus
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister Teknik

Semarang, Desember 2005

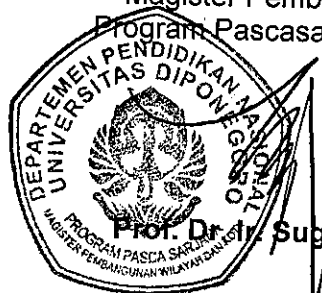
Pembimbing Pendamping

Ir. Holi Bina Wijaya, MUM

Pembimbing Utama

Ir. Nany Yuliasuti, MSP

Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Pembangunan Wilayah dan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Sugiono Soetomo, CES, DEA

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui dalam naskah ini dan disebut dalam Daftar Pustaka.

Semarang, Desember 2005

SOEDJARWOTO. S
NIM L4D 003107

HALAMAN PERSEMBAHAN

*... lebih baik jadi orang penting, namun
jauh lebih penting jadi orang baik...*

*mundur selangkah untuk
maju kedelapan penjuru mata angin...*

Tesis ini kupersembahkan untuk:

Istriku tercinta Sri Herlina,

Anak-anakku tersayang:

Ratna Permatasari, Devia Lusiana, Hidayat Purbawisesa.

*Yang banyak berkorban dan selalu menjadi sumber inspirasi dan
pembangkit semangatku dalam menyelesaikan Tesis ini.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat-Nya jugalah Tesis ini dapat terselesaikan.

Substansi yang diangkat sebagai kasus penelitian ini adalah berkaitan dengan **Pemanfaatan Rencana Strategis Kota dalam Penyusunan Usulan Program Pembangunan Kota Tanjungpinang**. Tema ini perlu dibahas mengingat sampai dengan saat ini, Renstra hanya digunakan dalam kaitan dengan perijinan. Padahal renstra ini dapat pula digunakan sebagai arahan lokasi investasi baik yang dilakukan pemerintah, swasta maupun masyarakat serta dapat dijadikan acuan dalam penyusunan usulan program.

Beberapa hal yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai pemanfaatan Renstra Kota Tanjungpinang oleh aparat pemerintah dalam penyusunan usulan program dan faktor-faktor yang mempengaruhi tidak digunakannya renstra tersebut dalam penyusunan usulan program.

Tidak lupa penyusun sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Walikota Tanjungpinang yang telah memberi kepercayaan kepada penulis untuk menjalani tugas belajar pada Program S2 MPWK Undip Semarang.
2. Ir. Nany Yuliasuti, MSP selaku mentor yang telah berbesar hati dengan sabar memberikan bimbingan dan wawasan kepada penulis.
3. Bapak Ir. Holi Bina Wijaya, MUM selaku co-mentor yang telah sudi meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing kami dalam penulisan hingga selesainya Tesis ini.
4. Ibu Ir. Sunarti, MT, selaku dosen penguji yang telah memberikan kritikan dan masukan berharga bagi penyempurnaan Tesis ini.
5. Bapak Ir. Mardwi Rahdriawan, MT selaku dosen penguji yang telah memberi banyak masukan dan arahan dalam penulisan Tesis ini.

Tiada gading yang tak retak, justru retak itulah membawa tuahnya. Penyusun menyadari bahwa Tesis yang dikerjakan sebatas kemampuan ini, masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, penyusun mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun bagi penyempurnaan Tesis ini.

Akhir kata, semoga Tesis ini bermanfaat bagi yang memerlukannya.

Semarang, Desember 2005

Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Sasaran	6
1.3.1 Tujuan	6
1.3.2 Sasaran	6
1.4 Ruang Lingkup	7
1.4.1 Ruang Lingkup Materi	7
1.4.2 Ruang Lingkup Spasial	7
1.5 Kerangka Pemikiran	9
1.6 Metode Penelitian	11
1.6.1 Pendekatan Penelitian	11
1.6.2 Kerangka Analisis	14
1.6.3 Teknik Analisis	16
1.6.4 Teknik Pengumpulan Data	21
1.6.5 Data yang Digunakan	23
1.7 Sistematika Pembahasan	24
BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PENYUSUNAN PROGRAM PEMBANGUNAN	
2.1 Definisi Rencana Strategis	26
2.2 Penyusunan Program Pembangunan	27
2.2.1 Perencanaan	27
2.2.2 Pembangunan	31
2.3 Perencanaan Pembangunan	32
2.4 Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan	39
2.5 Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan	41

BAB III GAMBARAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG DAN PROSES PENYUSUNAN PROGRAM PEMBANGUNAN KOTA TANJUNGPINANG

3.1 Karakteristik Fisik dan Geografis Kota Tanjungpinang	46
3.2 Renstra Kota Tanjungpinang (2003-2007)	48
3.2.1 Proses Penyusunan Renstra	48
3.2.1.1 Tujuan dan Sasaran	48
3.2.1.2 Landasan Penyusunan	49
3.2.1.3 Visi dan Misi Pembangunan Daerah	50
3.2.1.4 Agenda Pembangunan Kota Tanjungpinang	51
3.2.2 Mekanisme Penyelenggaraan Renstra	54
3.3 Strategi Kebijakan Sektoral Kota Tanjungpinang	55
3.4 Rencana Program Pembangunan di Kota Tanjungpinang	76
3.4.1 Proses Penyusunan Usulan Program Pembangunan	76
3.4.2 Instansi Penyusun Usulan Program	79

BAB IV ANALISIS RENCANA STRATEGIS DAN PENYUSUNAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI KOTA TANJUNGPINANG

4.1 Analisis Keterkaitan Instansi dengan Rencana Sektoral	83
4.2 Analisis Pemanfaatan Renstra dalam Penyusunan Program Pembangunan	86
4.2.1 Membandingkan Program Pembangunan Yang Ada dengan Rencana Strategis Kota Tanjungpinang	86
4.2.2 Persepsi Instansi Terhadap Penggunaan Renstra dalam Penyusunan Usulan Program Pembangunan	91
4.3 Analisis <i>Restatement</i> Renstra dalam Penyusunan Usulan Program dan Proyek Pembangunan Daerah	97
4.3.1 Pengetahuan Instansi Terhadap Keberadaan Renstra Kota Tanjungpinang	97
4.3.2 Pemahaman Instansi Terhadap Materi Renstra Kota Tanjungpinang	100
4.3.3 Perhatian Instansi Terhadap Renstra Kota Tanjungpinang	102
4.4 Analisis Penyusunan Usulan Program Pembangunan di Kota Tanjungpinang	104

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan	109
5.2 Rekomendasi	110

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
TABEL I.1 : Data yang Digunakan.....	24
TABEL II.1 : Dokumen Perencanaan Pembangunan di Indonesia	41
TABEL III.1 : Instansi Di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang dan Tugas Pokoknya	80
TABEL IV.1 : Keterkaitan Instansi dengan Jenis Usulan Rencana Sektoral	83
TABEL IV.2 : Jumlah Usulan Program dan Proyek Pembangunan Berdasarkan Sektor Pembangunan (TA 2003 – TA 2005)	85
TABEL IV.3 : Jumlah Usulan Program/Proyek Yang Sesuai Dengan Renstra Kota Tanjungpinang	87
TABEL IV.4 : Persepsi Instansi terhadap Penggunaan Renstra dalam Penyusunan Program Pembangunan	93
TABEL IV.5 : Alasan Responden Menggunakan Renstra dalam Program Pembangunan	95
TABEL IV.6 : Tingkat Pengetahuan Instansi Terhadap Keberadaan Renstra Kota Tanjungpinang	98
TABEL IV.7 : Alasan Responden Berkaitan Dengan Pengetahuan Terhadap Keberadaan Renstra Kota Tanjungpinang	99
TABEL IV.8 : Persepsi Instansi Terhadap Pemahaman Materi Renstra Kota Tanjungpinang	100
TABEL IV.9 : Keterkaitan Pengetahuan Terhadap Adanya Renstra dengan Pemahaman Terhadap Materi Renstra	101
TABEL IV.10 : Perhatian Instansi Terhadap Renstra Dalam Penyusunan Usulan Program Pembangunan	102
TABEL IV.11 : Keterkaitan Perhatian Instansi Terhadap Renstra Dengan Penggunaan Renstra Dalam Penyusunan Usulan Program Pembangunan	103
TABEL IV.12 : Keterkaitan Pengetahuan Terhadap Adanya Renstra, Pemahaman Terhadap Materi Renstra dan Perhatian Terhadap Renstra Dengan Penggunaan Renstra Dalam Penyusunan Usulan Program Pembangunan	105

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
GAMBAR 1.1 : Peta Wilayah Kajian	8
GAMBAR 1.2 : Kerangka Pemikiran Studi	10
GAMBAR 1.3 : Alur Pikir Proses Analisis Data	15
GAMBAR 3.1 : Mekanisme Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah di Kota Tanjungpinang	78

ABSTRAK

Perencanaan pembangunan melalui Rencana Strategis harus dapat mengakomodir perkembangan dan kebutuhan pembangunan. Di samping itu, rencana strategis harus bersifat realistis operasional dan benar-benar mampu berfungsi sebagai instrumen koordinasi bagi program-program pembangunan dari berbagai sumber pendanaan. Melalui perencanaan ingin dirumuskan kegiatan pembangunan yang secara efisien dan efektif dapat memberikan hasil yang optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan mengembangkan potensi yang ada.

Usulan-usulan program dan proyek dari masing-masing dinas/badan Kota Tanjungpinang pada umumnya berpedoman kepada program-program yang telah ditentukan oleh masing-masing dinas dan hanya bersifat daftar keinginan masyarakat semata, belum mengacu pada suatu pedoman yang dapat diacu oleh semua pihak. Pada saat pelaksanaan proyek pembangunan, proyek yang dilaksanakan tidak sesuai dengan usul yang diajukan dari bawah. Ketidaksesuaian usulan dengan realisasi proyek membawa konsekuensi pada penyusunan usulan program/proyek. Usulan yang datang dari bawah selalu berulang-ulang, bersifat formalitas dengan kesan pesimistik.

Maka dari itu diperlukan adanya keterpaduan program pembangunan yang tidak hanya ditunjukkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendaliannya, tetapi juga ditinjau dari keselarasan antara program pembangunan dengan rencana strategis (Renstra), karena pada dasarnya rencana strategis sebuah kota merupakan pedoman pelaksanaan pembangunan yang berisi kebijaksanaan, strategi dan program-program pembangunan kota selama jangka waktu perencanaan.

Kondisi-kondisi serti ini perlu dikaji dengan menganalisis pemanfaatan rencana strategis (Renstra) dalam penyusunan usulan program pembangunan tahunan sehingga diperoleh gambaran sejauhmana tingkat pemanfaatan rencana strategis (Renstra) untuk mencapai sinkronisasi antara rencana strategis (Renstra) dengan program pembangunan di daerah, khususnya di Kota Tanjungpinang. Kota Tanjungpinang menjadi menarik untuk diteliti dengan pertimbangan bahwa Kota Tanjungpinang masih merupakan sebuah kota otonom yang baru terbentuk yang ditetapkan sebagai Ibukota Provinsi Kepulauan Riau.

Dari kajian diatas ditemukan bahwa terjadi penurunan jumlah usulan program pembangunan, selain itu Renstra sendiri masih kurang fleksibel karena masih belum mampu mengimbangi perkembangan pembangunan. Secara materiel, rencana strategis Kota Tanjungpinang tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan daerah. Di lain sisi pengetahuan, pemahaman serta perhatian terhadap renstra sebagai acuan penyusunan usulan program pembangunan Kota Tanjungpinang masih sangat minim. Hal ini mengakibatkan tidak digunakannya Renstra oleh sebagian besar instansi dalam penyusunan usulan program pembangunan.

Hasil dari dari kajian tersebut merupakan evaluasi terhadap pemanfaatan Renstra dalam penyusunan program oleh Dinas/badan Kota Tanjungpinang. Sehingga dapat diketahui sejauhmana tingkat pemanfaatan Renstra selama ini oleh dinas/badan Kota Tanjungpinang. Berdasarkan hasil tersebut dari penelitian ini mencoba untuk memberikan rekomendasi mengenai bentuk pemanfaatan Renstra oleh dinas/badan Kota Tanjungpinang.

Kata kunci: Pemanfaatan Renstra dalam Penyusunan Usulan Program Pembangunan Kota Tanjungpinang.

ABSTRACT

Development planning through strategic plan have to earn to accomodate and growth requirement of development. Despitefully, strategic plan have to the character of realist of operational and really can function as instrument co-ordinate to development program from various source of financing. Passing planning wish to be formulated activity of development which efficiently and effective can give result of optimal in exploiting available resource and develop existing potency.

Program proposal and project from each on Departmental Tanjungpinang town in general be guided by program which have been determined by each on duty and only having the character of list desire of society, not yet at one particular guidance of mould able to by all side. At the of execution of project of development, project of which is executed disagree with raised suggestion from under. Inappropriate of proposal with realization of project of bringing consequence at compilation of program proposal/project. Incoming proposal from under always repeatedly, having the character of formality with impression of pessimist.

Hence from that needed the existence of integrity development program which not only shown in course of planning, execution and its operation, but also evaluated from compatibility between development program with strategic plan (Renstra), because basic illy strategic plan a town represent guidance of town execution during planning duration.

Conditions and also this require to study with analysing strategic plan exploiting (Renstra) in compilation annual development program proposal, so that obtained by picture how far mount strategic plan exploiting (Renstra) to reach synchronization between strategic plan (Renstra) with development program in area, specially in Tanjungpinang town. Tanjungpinang town become to draw to be checked with consideration that Tanjungpinang town still represent a otonomous town which is just formed which applied as Capital Of Provincial Archipelago of Riau.

From study above found that happened degradation of amount of development program proposal, besides Renstra alone still less flexible because still not yet can make balance to development growth. By material, strategic plan of Tanjungpinang town not give contribution which is significant to earnings of area. In other knowledge side, understanding and also attention to renstra as reference compilation of Tanjungpinang town development program proposal still very minim. This matter result not use of Renstra by most institution in compilation of development program proposal.

Result of from the study represent evaluation to Ranstra exploiting in compilation of program by Tanjungpinang Town Departement. So that can know how far mount Rens--a exploiting during the time by Tanjungpinang Town Departement. Pursuant to the result from this research try to give recommendation concerning Renstra exploiting form by Tanjungpinang Town Department.

Keyword: *Exploiting Renstra in Compilation of Proposal Program Town Tanjungpinang development.*

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan Otonomi Daerah telah memberikan implikasi adanya kewenangan yang lebih besar pada pemerintah daerah, khususnya pemerintah kabupaten/kota, dalam mengelola sumber daya yang ada di daerahnya. Pembangunan sebagai salah satu kegiatan dalam pengelolaan sumber daya, diberikan kewenangan yang luas pula mulai pada tahap perencanaan, pelaksanaan sampai dengan tahap pelaporan dan evaluasi.

Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah meningkatkan pelayanan publik (*public service*), dan memajukan perekonomian daerah. Otonomi daerah harus memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat (*public participation*), pemerataan dan keadilan (*equity and equality*), serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Dengan demikian maka terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah yaitu : (1) meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, (2) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah. (3) memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Pembangunan dilaksanakan dengan melibatkan pelaku pembangunan yaitu pemerintah, pengusaha dan masyarakat. Secara hirarki, pelaksanaan pembangunan harus berjalan secara optimal pada setiap jenjang pemerintahan, baik nasional,

regional dan lokal. Pembangunan daerah mempunyai peranan penting karena keberhasilan pembangunan daerah selain akan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakatnya juga akan memberikan kontribusi terhadap tingkat keberhasilan pembangunan pada jenjang pemerintahan yang lebih tinggi yaitu skala regional dan nasional.

Perencanaan pembangunan melalui Rencana Strategis harus memiliki daya antisipasi tinggi terhadap perkembangan dan tidak kalah cepat dengan kebutuhan pembangunan. Di samping itu, rencana strategis harus bersifat realistis operasional dan benar-benar mampu berfungsi sebagai instrumen koordinasi bagi program-program pembangunan dari berbagai sumber pendanaan.

Melalui perencanaan ingin dirumuskan kegiatan pembangunan yang secara efisien dan efektif dapat memberikan hasil yang optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan mengembangkan potensi yang ada. Friedmann (1987: 58). Perencanaan merupakan kegiatan penyiapan strategi (serangkaian rumusan tindakan) untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu. Dengan perkataan lain perencanaan merupakan penentuan tujuan pokok (tujuan utama) beserta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan pada prinsipnya merupakan kegiatan yang berorientasi pada masa depan, atau dengan perkataan lain perencanaan merupakan seperangkat kegiatan yang dilakukan sebelum kegiatan tersebut terjadi (Greed, 1996: 164).

Berdasarkan hal tersebut diatas maka diperlukan adanya keterpaduan program pembangunan yang tidak hanya ditunjukkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendaliannya, tetapi juga ditinjau dari keselarasan antara

program pembangunan dengan rencana strategis (Renstra), karena pada dasarnya rencana strategis sebuah kota merupakan pedoman pelaksanaan pembangunan yang berisi kebijaksanaan, strategi dan program-program pembangunan kota selama jangka waktu perencanaan.

Salah satu upaya sinkronisasi antara program dan proyek pembangunan dengan rencana strategis (Renstra) di daerah adalah menggunakan rencana strategis tersebut dalam proses penyusunan usulan program pembangunan. Kegiatan ini dilakukan melalui sinkronisasi lokasi program dan proyek pembangunan dengan rencana strategis hingga menghasilkan rencana pembangunan tahunan daerah (Repetada) yang sinkron dengan rencana strategis. Program dan proyek yang tidak sesuai dengan renstra akan menimbulkan ketidakkonsistenan dalam pemanfaatan ruang yang ada. Sesuai atau tidaknya usulan program/proyek dengan rencana tata ruang ditentukan oleh kesesuaian lokasi program/proyek dengan renstra (Oetomo, 1998: 85). Di Kota Tanjungpinang, upaya sinkronisasi tersebut telah dilakukan dengan cara memasukkan arah kebijaksanaan perwilayahan yang terdapat dalam dokumen rencana strategis (Renstra) sebagai salah satu kebijaksanaan yang harus diacu dalam penyusunan usulan program pembangunan.

Lebih lanjut disebutkan bahwa hal ini disebabkan oleh beberapa faktor penyebab ketidakberhasilan rencana dalam mengarahkan pembangunan, di antaranya adalah bahwa rencana dianggap terlalu lambat dalam mengantisipasi perkembangan yang terjadi sebagai akibat dari rencana yang disusun biasanya bersifat jangka menengah dan jangka panjang sementara perubahan dapat setiap

waktu terjadi; persiapan dan implementasi rencana membutuhkan kemampuan administrasi dan teknis dari pelaksana yang jarang sekali tersedia; dan rencana jarang memperhatikan biaya dampak akibat dari keputusan yang diambil atau berasal dari mana sumber daya yang digunakan.

Kenyataan lain menunjukkan bahwa pembangunan yang dilakukan seringkali tidak didasarkan pada rencana yang telah disepakati. Briassoulis (1997: 201) menyatakan bahwa perencanaan yang tidak institusional (*informal planning*) justru mengarah pada kebutuhan masyarakat yang nyata. Rencana yang sebelumnya tidak ada dalam rencana yang telah disepakati (*formal planning*) dalam pembangunan akan berjalan beriringan atau bahkan bergabung dengan rencana yang telah disepakati. Kondisi ini terjadi ketika rencana strategis (Renstra) tidak dapat menampung kebutuhan yang sedang berkembang di masyarakat.

Kondisi-kondisi tersebut di atas perlu dikaji dengan menganalisis pemanfaatan rencana strategis (Renstra) dalam penyusunan usulan program pembangunan tahunan sehingga diperoleh gambaran sejauhmana tingkat pemanfaatan rencana strategis (Renstra) untuk mencapai sinkronisasi antara rencana strategis (Renstra) dengan program pembangunan di daerah, khususnya di Kota Tanjungpinang. Kota Tanjungpinang menjadi menarik untuk diteliti dengan pertimbangan bahwa Kota Tanjungpinang masih merupakan sebuah kota otonom yang baru terbentuk yang ditetapkan sebagai Ibukota Provinsi Kepulauan Riau.

1.2 Perumusan Masalah

Kunarjo (1992: 85) menyatakan bahwa sebagian besar rencana lokal jika tidak dapat dilaksanakan akibatnya akan mengecewakan rakyat. Soetrisno (1988: 74) juga menyatakan hal yang serupa bahwa hasil proses penyaringan program yang dilakukan dengan pendekatan *bottom-up* sering mengecewakan masyarakat karena proyek yang mereka usulkan berubah jenisnya atau bahkan ditolak.

Usulan-usulan program dan proyek dari masing-masing dinas/badan Kota Tanjungpinang pada umumnya berpedoman kepada program-program yang telah ditentukan oleh masing-masing dinas dan hanya bersifat daftar keinginan masyarakat semata, belum mengacu pada suatu pedoman yang dapat diacu oleh semua pihak. Hal ini telah berdampak pada tingkat pengusul proyek pada lapisan bawah. Pada saat pelaksanaan proyek pembangunan, proyek yang dilaksanakan tidak sesuai dengan usul yang diajukan dari bawah. Ketidaksesuaian usulan dengan realisasi proyek membawa konsekuensi pada penyusunan usulan program/proyek. Usulan yang datang dari bawah selalu berulang-ulang, bersifat formalitas dengan kesan pesimistik.

Maka dokumen rencana strategis (Renstra) yang telah disusun dan ditetapkan peraturannya belum sepenuhnya menjadi acuan dalam penyusunan program sektoral terutama dalam dinas-dinas instansi terkait. Hal ini menyebabkan dokumen rencana strategis (Renstra) yang mempunyai peranan penting dalam menjembatani proses perencanaan dan pelaksanaannya belum optimal dimanfaatkan.

Sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan, Kota Tanjungpinang telah memiliki Pola Dasar (Poldas) Pembangunan yang disahkan melalui Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 9 Tahun 2003, Program Pembangunan Daerah (Propeda) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 10 Tahun 2003, serta Rencana Strategis (Renstra) Kota Tanjungpinang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang, nomor 11 tahun 2003. Dokumen kebijakan tersebut dimaksudkan untuk menjadi dasar pertimbangan dalam penjabaran kegiatan pembangunan tahunan daerah.

Pada studi ini, penelitian yang diangkat akan dirumuskan dalam bentuk pertanyaan yaitu **“seberapa besar tingkat pemanfaatan rencana strategis (Renstra) oleh dinas pemerintah Kota Tanjungpinang dalam penyusunan usulan program pembangunan di Kota Tanjungpinang?”**.

1.3 Tujuan dan Sasaran

1.3.1 Tujuan

Tujuan dari studi ini adalah untuk melakukan kajian pemanfaatan rencana strategis kota dalam penyusunan program pembangunan Kota Tanjungpinang.

1.3.2 Sasaran

Sedangkan sasaran yang hendak dicapai dalam studi ini adalah:

1. Identifikasi terhadap Rencana Strategis Kota Tanjungpinang (Renstra Kota Tanjungpinang).
2. Identifikasi program-program pembangunan sektoral di dinas/badan di Kota Tanjungpinang.

3. Analisis pemanfaatan Rencana Strategis (Renstra) dalam proses penyusunan program sektoral di setiap dinas secara normatif, operasional dan proses.
4. Rekomendasi pemanfaatan Rencana Strategis (Renstra) dalam penyusunan program sektoral dinas Kota Tanjungpinang.

1.4 Ruang Lingkup

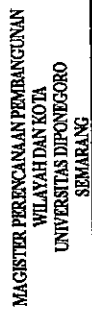
1.4.1 Ruang Lingkup Materi

Kajian ini lebih ditekankan pada pemanfaatan Rencana Strategis Kota Tanjungpinang dalam penyusunan usulan program pembangunan yang dilakukan setiap tahun oleh dinas atau badan di Kota Tanjungpinang yang terkait dengan penataan ruang yaitu Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Bappeko, Bagian Pembangunan, Setdako.

Program yang dimaksud dalam kajian ini lebih kepada proyek pembangunan yang merupakan bagian dari 20 sektor pembangunan yang setiap tahun diusulkan. Program/proyek pembangunan tersebut merupakan suatu satuan investasi terkecil dalam suatu sektor pembangunan dan dimaksudkan untuk mencapai target dan tujuan-tujuan pembangunan.

1.4.2 Ruang Lingkup Spasial








Wilayah yang dikaji dalam studi ini adalah wilayah administrasi Kota Tanjungpinang yang terdiri dari 4 kecamatan, sebagai suatu entitas daerah otonom yang selalu menyelenggarakan kegiatan penyusunan usulan program pembangunan setiap tahun dan sebagai daerah yang telah memiliki Renstra yang harus dimanfaatkan dalam kegiatan pembangunan. Peta wilayah kajian dapat dilihat pada **Gambar 1.1**.



**PEMANTAUAN RENCANA STRATEGIS DALAM
PENTUSUNAN USULAN PROGRAM PEMBANGUNAN
KOTA TANJUNGPINANG**

WILAYAH STUDI

Keterangan:

-  Batas Kabupaten / Kota
 Batas Kecamatan
 Jalan Arteri
 Jalan Kolektor
 Sungai / Batas Darat
 Waduk
 Lokasi Ramayana

Skala

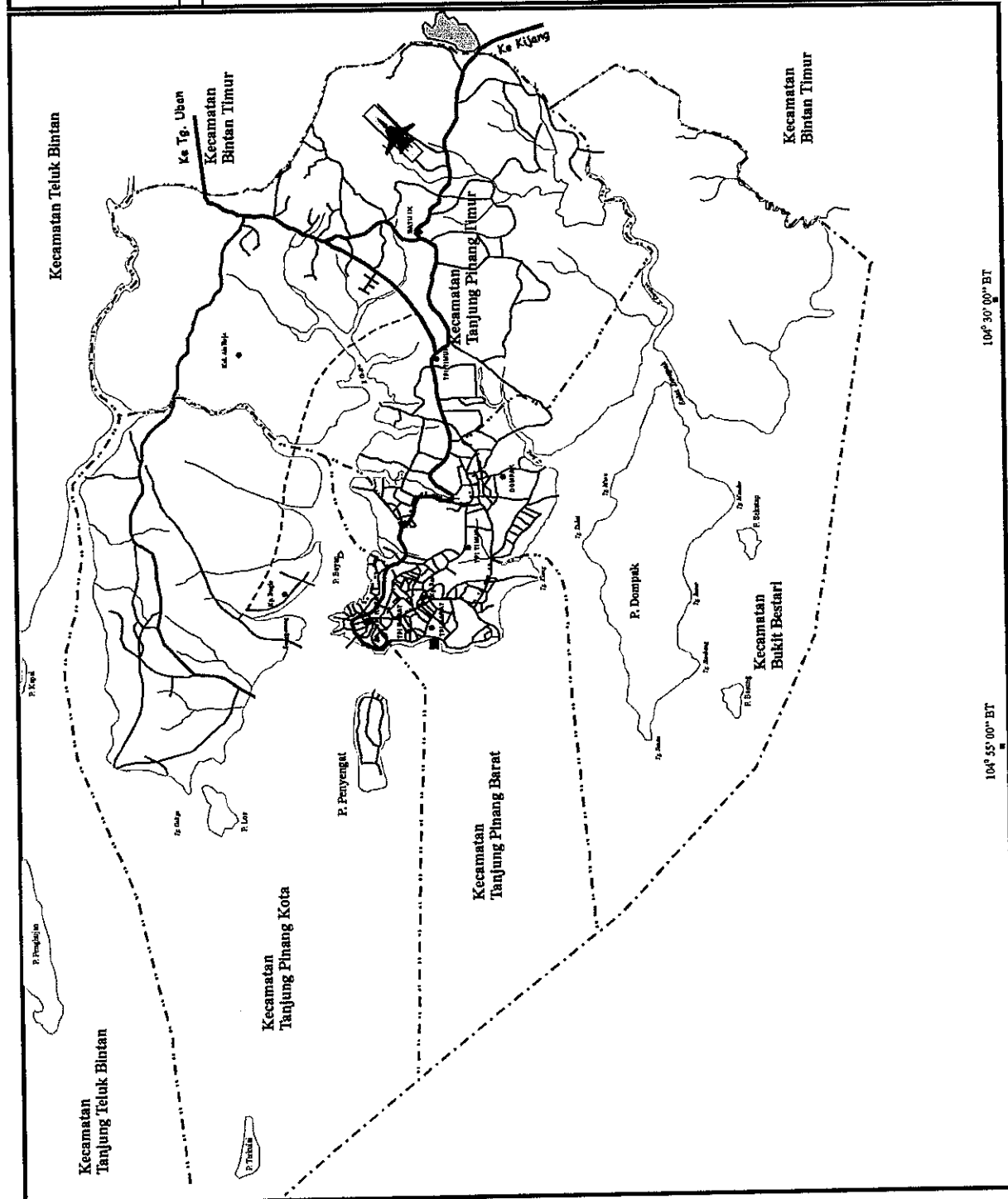
No. Peta

Utara



Sumber

**RTRW
Kota Tanjungpinang
tahun 2002**



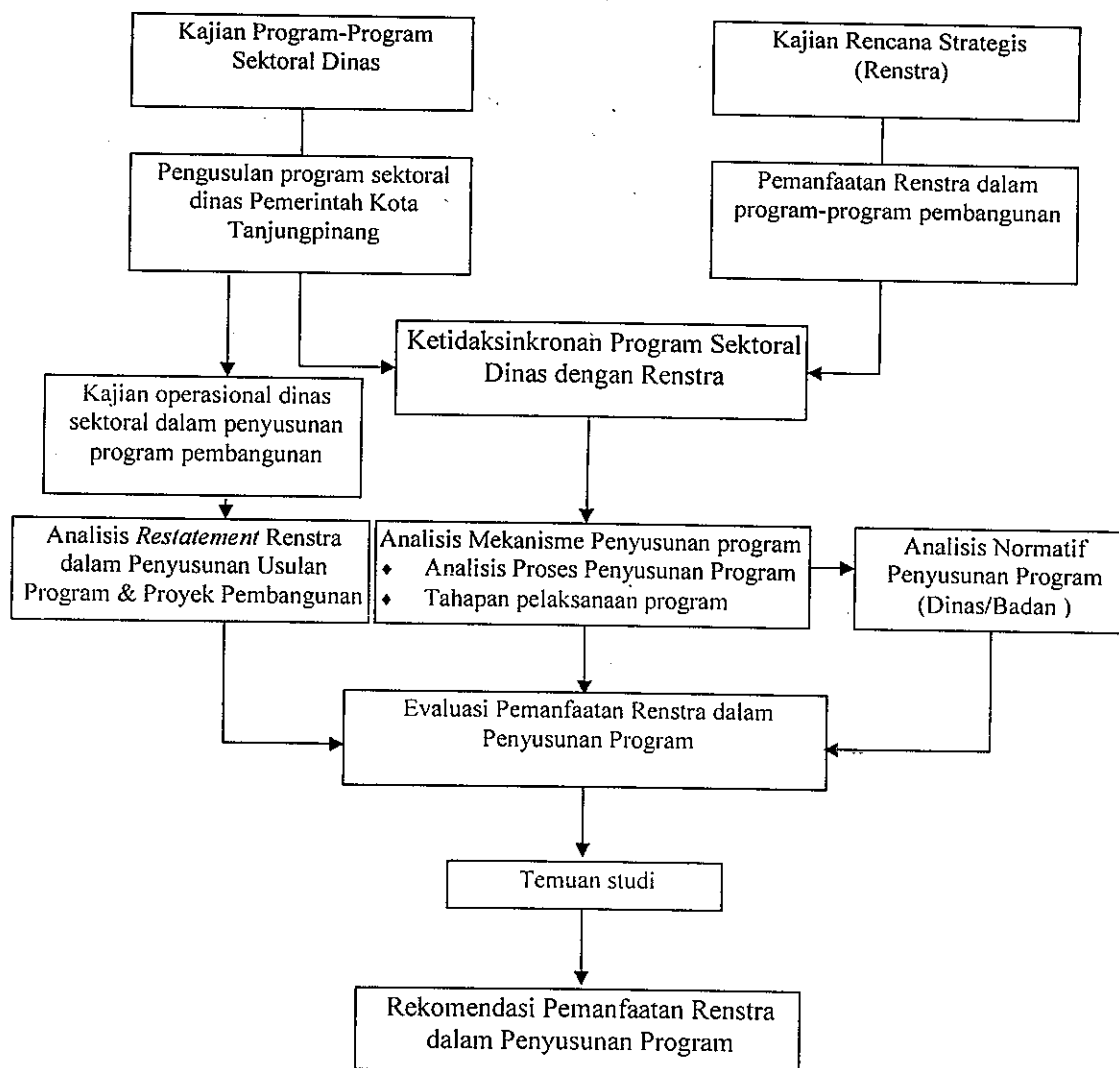
1.5 Kerangka Pemikiran

Pemerintah bersama *stakeholder* yang lain berusaha untuk mewujudkan pembangunan tersebut dalam berbagai sektor. Dalam hal ini dinas-dinas dan badan yang ada di Kota Tanjungpinang merupakan bagian dari pemerintah kota yang bertugas menyusun program-program sektoral. Penyusunan program pembangunan yang dilakukan oleh dinas/badan kota dilakukan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) yang di dalamnya antara lain terdapat arahan kebijaksanaan wilayah pembangunan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kota. Sehingga dalam penelitian ini perlu dikaji juga mengenai produk Renstra yang berlaku di Kota Tanjungpinang.

Dengan mengkaji program sektoral, dikaitkan dengan Renstra Kota maka dapat diketahui kesesuaian antara program yang diusulkan di tingkat dinas Kota dengan Rencana Strategis yang ada. Tingkat kesesuaian tersebut dikaji lebih mendalam dengan menganalisis mekanisme penyusunan program secara praktis melalui proses maupun tahapan penyusunannya. Selain itu secara normatif dikaji juga mengenai penyusunan program tersebut dengan menggunakan peraturan-peraturan yang sudah ada.

Hasil dari kajian tersebut merupakan evaluasi terhadap pemanfaatan Renstra dalam penyusunan program oleh Dinas/badan Kota Tanjungpinang. Sehingga dapat diketahui sejauhmana tingkat pemanfaatan Renstra selama ini oleh dinas/badan Kota Tanjungpinang. Berdasarkan hasil tersebut dari penelitian ini mencoba untuk memberikan rekomendasi mengenai bentuk pemanfaatan Renstra

oleh dinas/badan Kota Tanjungpinang. Selengkapnya kerangka pemikiran studi ini dapat dilihat pada **Gambar 1.2**.



GAMBAR 1.2
KERANGKA PEMIKIRAN STUDI

Sumber: Hasil Analisis, 2005

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Pendekatan Penelitian

Kajian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, dengan penekanan pada pendekatan kualitatif sesuai dengan tujuan dan sasaran studi yang ingin dicapai. Pendekatan kualitatif dilakukan juga karena permasalahan yang diangkat adalah permasalahan yang tidak terungkap melalui data-data statistik sehingga perlu pendekatan tertentu untuk memahaminya. Penelitian kualitatif merupakan cara untuk memahami perilaku sosial yang merupakan serangkaian kegiatan atau upaya menjaring informasi secara mendalam dari fenomena atau permasalahan yang ada di dalam kehidupan suatu obyek, dihubungkan dengan pemecahan suatu masalah, baik dari sudut pandang teoritis maupun empiris. Sedangkan pendekatan kuantitatif yang dilakukan merupakan pendekatan yang digunakan untuk memformulasikan data-data kualitatif yang diperoleh yaitu berkaitan dengan penggunaan Renstra Kota Tanjungpinang dalam penyusunan usulan program pembangunan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya yang meliputi pengetahuan terhadap adanya Renstra, pemahaman terhadap materi Renstra dan perhatian terhadap Renstra dalam penyusunan usulan program pembangunan.

Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2002: 52), metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang akan menghasilkan data kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan suatu proses yang diamati. Pendekatan kualitatif ini diartikan juga sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian

(masyarakat, suatu proses dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Pendekatan kualitatif ini memungkinkan peneliti mendekati data primer dari sumbernya sehingga mampu mengembangkan komponen-komponen keterangan yang analitis, konseptual dan kategoris dari data itu sendiri. Sedangkan data kualitatif merupakan sumber dari deskripsi yang luas dan berlandasan kokoh, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup sektoral. (Miles, 1992: 81).

Penemuan-penemuan dari penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif mempunyai mutu yang tidak dapat disangkal. Kata-kata, khususnya bilamana disusun ke dalam bentuk cerita atau peristiwa mempunyai kesan yang lebih nyata, hidup dan penuh makna, seringkali jauh lebih meyakinkan pembacanya daripada halaman-halaman yang penuh dengan angka-angka (Miles, 1992: 90).

Selain itu, pendekatan penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian ini adalah penelitian survei, yaitu penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, data yang diambil dari populasi tersebut, sehingga dapat ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi dan hubungan antar variabel, sosiologis maupun psikologis. Alasan-alasan ini menyangkut faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu pengetahuan terhadap adanya Renstra Kota Tanjungpinang, pemahaman terhadap materi Renstra serta perhatian penyusunan usulan terhadap Renstra dalam penyusunan usulan program. Penelitian ini juga dilakukan pada suatu populasi yaitu dinas instansi di lingkungan Pemerintah Kota

Tanjungpinang untuk mengetahui seberapa besar tingkat pemanfaatan rencana strategis (Renstra) dalam penyusunan usulan program.

Evaluasi dipergunakan untuk mengukur dan menilai hasil dari penerapan kebijaksanaan/program-program. Fungsi-fungsi utama evaluasi dibagi dalam 3 kategori, yaitu (Dunn, 2000: 27):

1. Menyediakan dan memberikan informasi yang terpercaya mengenai kinerja kebijakan.
2. Memberikan kontribusi pada penjelasan dan kritik terhadap nilai-nilai yang menjadi dasar penentuan tujuan dan sasaran yang objektif.
3. Memberikan kontribusi pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan.

Berkaitan dengan hal di atas (Ripley, 1985: 73) menyebutkan bahwa evaluasi kebijakan bertujuan untuk mengetahui 4 aspek antara lain:

1. Proses pembuatan kebijakan.
2. Proses implementasi.
3. Konsekuensi kebijakan.
4. Keefektifan kebijakan.

Suatu kebijakan dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan pada dasarnya harus dapat menjelaskan seberapa jauh kebijakan dan implementasinya telah dapat mencapai tujuan atau hasil yang diharapkan (Bryant dan White, 1987: 61).

1.6.2 Kerangka Analisis

Untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini, maka kerangka analisis yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

1. Analisis mekanisme penyusunan program sektoral oleh Dinas/Badan di Kota Tanjungpinang.

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesesuaian mekanisme penyusunan program dengan Renca Strategis Kota Tanjungpinang .

2. Analisis normatif penyusunan program sektoral oleh Dinas/Badan di Kota Tanjungpinang dengan melakukan kajian mengenai:

- a. Renstra digunakan sebagai salah satu kriteria dalam menyusun prioritas program dan proyek
- b. Alasan digunakan atau tidaknya Renstra dalam penyusunan usulan program dan proyek pembangunan.
- c. Pelaksanaan peraturan-peraturan lain yang mengatur mekanisme tersebut.

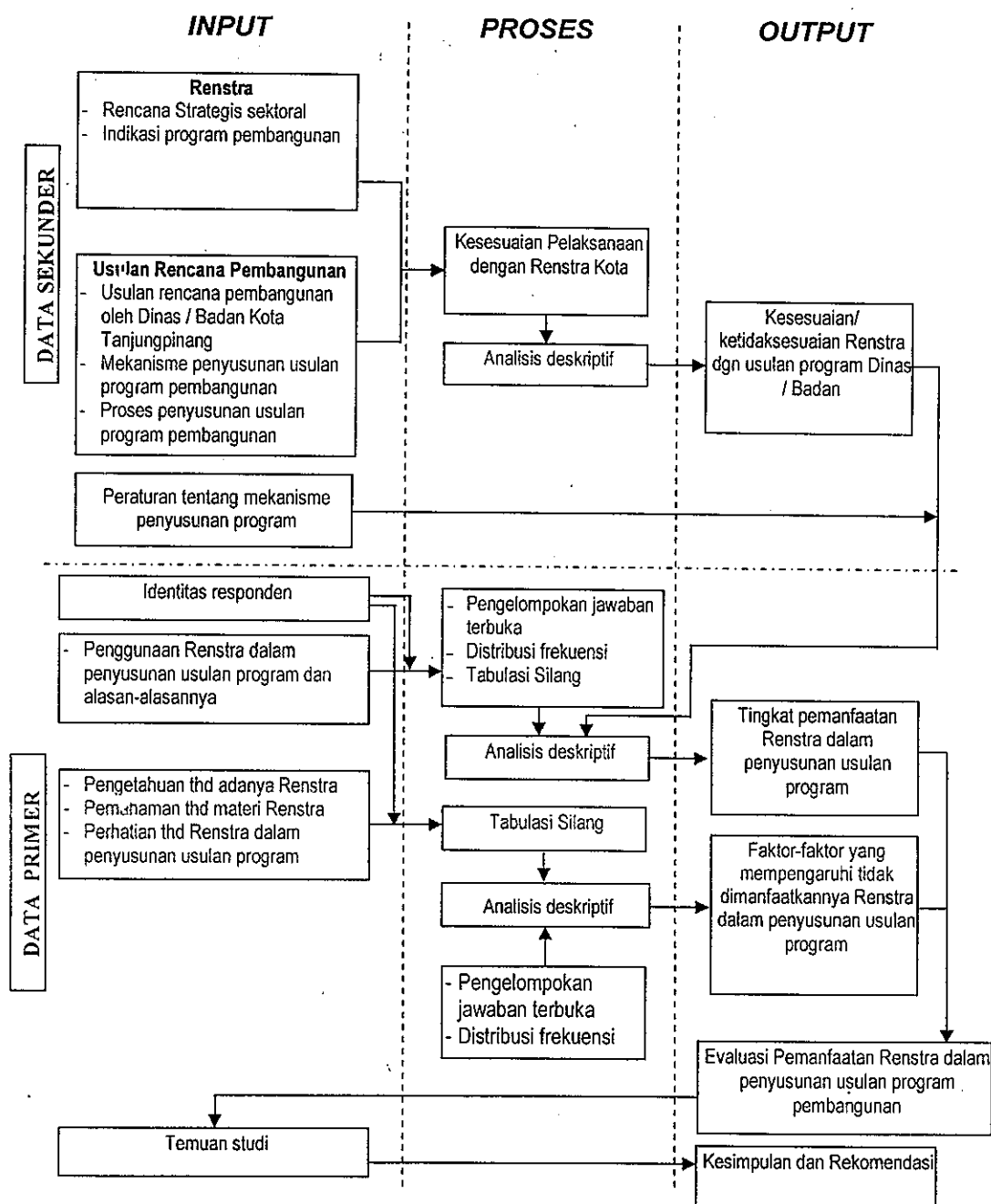
3. Analisis terhadap proses penyusunan program sektoral di Dinas/Badan Kota Tanjungpinang dan tahapan pelaksanaannya.

4. Analisis evaluasi terhadap faktor-faktor yang menyebabkan rencana strategis tidak dimanfaatkan dalam penyusunan usulan program pembangunan daerah di Kota Tanjungpinang dengan cara menganalisis:

- a. Pengetahuan penyusun usulan program akan keberadaan Renstra dan alasan tahu atau tidaknya tentang Renstra,
- b. Pemahaman dinas/badan kota terhadap substansi Renstra dan alasan tentang dipahami atau tidaknya Renstra

- c. Dinas/Badan Kota memperhatikan Renstra dalam penyusunan usulan program dan alasan tentang diperhatikan atau tidaknya Renstra.

Lebih lanjut kerangka analisis dapat dilihat pada Gambar 1.3.



GAMBAR 1.3
ALUR PIKIR PROSES ANALISIS DATA

Sumber: Hasil Analisis, 2005

1.6.3 Teknik Analisis

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan (Singarimbun, 1995). Analisis yang akan dipergunakan dalam kajian ini adalah analisis deskriptif terhadap data kualitatif dan didukung oleh analisis kuantitatif yang berkaitan dengan pemanfaatan Renstra dalam penyusunan usulan program pembangunan.

Data yang telah diperoleh melalui kuesioner mengenai tingkat penggunaan Renstra dalam penyusunan usulan program, pengetahuan terhadap adanya Renstra, pemahaman isi materi, dan perhatian terhadap Renstra dalam penyusunan usulan program kemudian diolah dengan menggunakan teknik analisa deskriptif. Pengertian deskriptif tidak hanya sekedar menemukan data atau fakta dan kemudian menyajikannya dalam bentuk mentah, kemudian penafsirannya diserahkan kepada pembaca yang berminat, melainkan juga melakukan analisis serta menyajikan data dan fakta yang sudah terolah beserta penafsirannya. Lebih lanjut, teknik ini digunakan untuk menganalisa data dengan cara:

- Mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul,
- Menginterpretasikan kondisi atau hubungan yang ada,
- Menggambarkan proses yang sedang berlangsung,
- Menggambarkan kecenderungan atau pendapat yang sedang berkembang.

Berdasarkan hasil tersebut akan dapat dilakukan penafsiran terhadap data dan akan diperoleh kesimpulan dari fenomena yang sedang berlangsung. Deskripsi ini dilakukan setelah terlebih dahulu dilakukan pengelompokan jawaban-jawaban yang diperoleh dari responden terutama mengenai alasan-alasan

responden yang berkaitan dengan digunakan atau tidaknya Renstra, diketahui atau tidaknya Renstra, dimengerti atau tidaknya isi materi Renstra dan diperhatikan atau tidaknya Renstra dalam penyusunan usulan program pembangunan di Kota Tanjungpinang.

Apabila data telah terkumpul, maka dilakukan klasifikasi data menjadi 2 kelompok yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data yang dihasilkan kemudian diolah melalui proses pengecekan, pemberian tanda, simbol, kode bagi tiap-tiap data sesuai dengan pengelompokannya dan sesuai kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, serta pengelompokan data dengan cara yang teliti dan teratur, kemudian dihitung dan dijumlahkan berapa banyak peristiwa, gejala, item dan lain-lain yang termasuk dalam satu kategori. Data kualitatif yang diperoleh dari kuesioner melalui jawaban-jawaban terbuka terutama yang berkaitan dengan alasan digunakan atau tidaknya Renstra, tahu atau tidaknya akan keberadaan Renstra, dimengerti atau tidaknya Renstra oleh responden, diperhatikan atau tidaknya Renstra dalam penyusunan usulan program, kemudian dilakukan pengelompokan jawaban untuk diberi kode sebelum diproses lebih lanjut untuk diketahui distribusi frekuensinya.

Data yang bersifat kualitatif, digambarkan hasilnya dengan kata-kata atau kalimat, dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Sedangkan data yang bersifat kuantitatif, diproses dengan beberapa cara antara lain (Arikunto, 1998: 48):

1. Dijumlahkan, dibandingkan dengan jumlah yang diharapkan dan diperoleh persentase. Kadang-kadang pencarian persentase dimaksudkan untuk

mengetahui status sesuatu yang dipersentasekan dan disajikan dalam bentuk persentase. Tetapi kadang-kadang persentase tersebut ditafsirkan dengan kalimat yang bersifat kualitatif. Sebaliknya data kualitatif yang ada seringkali dikuantifikasikan sekedar untuk mempermudah penggabungan dua atau lebih data variabel, kemudian setelah terdapat hasil akhir lalu dikualifikasikan kembali. Teknik ini sering disebut dengan teknik deskriptif kualitatif dengan persentase.

2. Dijumlahkan, diklasifikasikan sehingga merupakan suatu susunan urut data, untuk selanjutnya dibuat tabel, baik yang hanya berhenti sampai tabel saja maupun yang diproses lebih lanjut menjadi perhitungan pengambilan kesimpulan ataupun untuk kepentingan visualisasi data.

Visualisasi data sangat mempermudah peneliti atau orang lain untuk memahami hasil penelitian. Cara visualisasi ini antara lain dapat berupa grafik, diagram batang, diagram kue dan lain-lain.

Analisis terhadap data kualitatif yang diperoleh dari kuesioner yang merupakan jawaban terbuka, dilakukan melalui tiga kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu (Miles, 1992: 85):

1. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang

tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan akhir dapat ditarik dan diverifikasi.

Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara, yaitu melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas dan sebagainya.

2. Penyajian data

Penyajian data diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang paling sering digunakan pada data kualitatif pada masa yang lalu adalah bentuk teks naratif. Tetapi sekarang, penyajian data dapat berupa tabel, matriks, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, dengan demikian dapat dilihat fenomena apa yang sedang terjadi. Pada studi ini, penyajian data lebih banyak menggunakan tabel-tabel, baik untuk menunjukkan distribusi frekuensi maupun keterkaitan antara klasifikasi instansi dengan digunakan atau tidaknya Renstra dan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi tidak digunakannya Renstra dalam penyusunan usulan program. Selain itu, tabel yang disajikan merupakan keterkaitan antara penggunaan Renstra dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3. Menarik kesimpulan/verifikasi

Dari permulaan pengumpulan data, mulai dilakukan pencarian arti informasi, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang

mungkin, alur sebab akibat dan proposisi. Melalui kegiatan penelitian, kesimpulan yang mula-mula belum jelas kemudian menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Kesimpulan akhir mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data berakhir, tergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan dan metode pencarian ulang yang digunakan dan kecakapan peneliti.

Berdasarkan uraian di atas, kegiatan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi merupakan kegiatan yang saling terkait pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar. Dengan perkataan lain, ketiga jenis kegiatan tersebut dan kegiatan pengumpulan data merupakan proses siklus dan interaktif. Pengkodean data, misalnya (reduksi data), menjurus ke arah gagasan-gagasan baru guna dimasukkan ke dalam suatu matriks (penyajian data). Begitu matriks terisi, kesimpulan awal dapat ditarik.

Dalam analisis kuantitatif akan digunakan analisis tabulasi silang terhadap data (pilihan jawaban) yang diperoleh dari kuesioner. Tabulasi silang merupakan teknik analisis yang menggunakan data kategori atau data berkelas yang selanjutnya diolah untuk mengetahui adanya karakteristik korelasi atau hubungan satu variabel dengan variabel lain (Dillon, 1984: 82). Lebih lanjut bahwa analisis tabulasi silang adalah teknik analisis yang paling sederhana tetapi memiliki daya menerangkan cukup kuat untuk menjelaskan hubungan antar variabel. Dalam pengolahan data kuantitatif melalui tabulasi silang ini akan digunakan komputer dengan perangkat lunak *Statistical Product and Service Solutions (SPSS)* (Singarimbun, 1995: 43). Tabulasi silang yang dilakukan adalah antara klasifikasi

instansi dengan penggunaan Renstra dan antara penggunaan Renstra dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu pengetahuan terhadap adanya Renstra, pemahaman terhadap isi materi Renstra dan perhatian terhadap Renstra dalam penyusunan usulan program.

1.6.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dari suatu studi atau penelitian, secara umum dibagi menjadi dua, yaitu pengumpulan data primer dan pengumpulan data sekunder. Pengumpulan data primer merupakan pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti secara langsung kepada objek penelitian di lapangan, sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan peneliti dengan cara tidak langsung ke objek studi tetapi melalui penelitian terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek studi (Singarimbun, 1995: 54).

Data yang digunakan dalam kajian ini diperoleh dengan cara pengumpulan data sekunder dan kajian literatur untuk keperluan data sekunder, serta pengumpulan data primer untuk keperluan data primer. Teknik untuk mendapatkan data sekunder adalah dengan cara mempelajari dan mencatat dokumen perencanaan, peraturan yang ada dan sebagainya, yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti untuk bahan menganalisa permasalahan. Teknik dokumentasi ini dilakukan untuk mendukung data primer yang telah diperoleh.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data primer adalah dengan penyebaran kuesioner. Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden mengenai hal-hal yang ia

ketahui (Arikunto, 1998: 60). Kuesioner digunakan untuk mengetahui tingkat pemanfaatan Renstra melalui pertanyaan digunakan atau tidaknya rencana strategis dalam penyusunan usulan program beserta alasannya, dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tidak digunakannya rencana strategis melalui pertanyaan tahu atau tidaknya responden terhadap adanya Renstra, mengerti atau tidaknya responden terhadap isi materi Renstra, dan diperhatikan atau tidaknya Renstra dalam penyusunan usulan program, beserta masing-masing alasannya. Selanjutnya, berdasarkan klasifikasi jenis kuesioner, jika dilihat dari cara menjawabnya, maka kuesioner yang digunakan merupakan kuesioner tertutup sekaligus juga kuesioner terbuka karena selain telah disediakan jawabannya, responden juga diberikan keleluasaan untuk memberikan jawaban lain yang dianggap sesuai dengan kondisi yang ada.

Kuesioner ini disebarkan kepada Dinas/Badan yang berkaitan dengan penyusunan renstra dan usulan program yang berada di Kota Tanjungpinang sebagai populasi dari studi ini. Agar tujuan studi dapat tercapai, maka dalam pengisian kuesioner ini, responden adalah orang yang mengetahui secara tepat permasalahan yang terkait dengan tema kajian. Responden merupakan pimpinan tertinggi dari suatu dinas/badan yang kredibilitasnya dapat dipertanggungjawabkan atau responden yang ditunjuk oleh pimpinan instansi karena memiliki pengetahuan yang berkaitan dengan permasalahan yang diajukan dalam studi ini. Kriteria minimal dari responden adalah responden pernah satu kali terlibat dalam penyusunan usulan program dan proyek pembangunan.

Banyaknya responden disesuaikan dengan jumlah dinas dan badan yang ada di Kota Tanjungpinang yang setiap tahun menyusun usulan program pembangunan.

Dalam hal ini pihak yang terkait langsung adalah dinas yang berkaitan dengan pembangunan fisik, antara lain:

- Kimpraswil
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- Dinas Perhubungan
- Bappeda Kota
- Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
- Sekretariat (Bagian Pembangunan)

1.6.5 Data yang Digunakan

Untuk keperluan kajian ini maka digunakan data primer dan sekunder. Data sekunder berupa dokumen rencana strategis (Renstra), dokumen rencana usulan proyek dan data pendukung lainnya diperoleh dari seluruh instansi dan Bappeko sebagai koordinator pengumpulan usulan proyek di daerah. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang berasal dari aparat pemerintah untuk mengidentifikasi seberapa besar tingkat pemanfaatan rencana strategis dalam penyusunan usulan proyek pembangunan. Data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada **Tabel I.1**.

TABEL I.1
DATA YANG DIGUNAKAN

No	Jenis Data	Sumber	Keterangan
1.	Dokumen perencanaan pembangunan - Pola Dasar Pembangunan - Propeda - Repetada	Bappeko	Data primer
2.	Data usulan program/proyek pembangunan	Bappeko	3 tahun Tahun 2002-2004
3.	Rencana Strategis (Renstra)	Bappeko	
4.	Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2002 tentang Perangkat Daerah	Bagian Hukum	
5.	Mekanisme perencanaan pembangunan yang digunakan	Bappeko	
6.	Tingkat pemanfaatan rencana strategis dalam penyusunan usulan program	instansi	Penyebaran kuesioner
7.	Faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan rencana strategis dalam penyusunan usulan program	instansi	Penyebaran kuesioner
8.	Usulan responden tentang rencana strategis agar dapat digunakan dalam penyusunan usulan program di masa mendatang	instansi	Penyebaran kuesioner

Sumber: Hasil Analisis, 2005

1.7 Sistematika Penulisan

Kajian ini memiliki sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran studi, ruang lingkup substansi dan wilayah, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Rencana Strategis dan Penyusunan Program Pembangunan

Hal-hal yang dibahas adalah tentang konsepsi rencana strategis, perencanaan pembangunan daerah dan peran rencana strategis dalam perencanaan pembangunan.

Bab III Gambaran Umum Kota Tanjungpinang dan Proses Penyusunan Program Pembangunan di Kota Tanjungpinang

Bab ini berisi mengenai karakteristik fisik dan geografis Kota Tanjungpinang, gambaran singkat mengenai dokumen Rencana Strategis dan perencanaan pembangunan daerah di Kota Tanjungpinang.

Bab IV Analisis Rencana Strategis dan Penyusunan Usulan Program Pembangunan di Kota Tanjungpinang

Bab ini merupakan analisis terhadap pemanfaatan Renstra dalam penyusunan usulan program pembangunan yang meliputi analisis mengenai tingkat penggunaan Renstra dan faktor-faktor yang mempengaruhi tidak dimanfaatkannya Renstra dalam penyusunan usulan program pembangunan.

Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi

Pada bab ini dibahas mengenai kesimpulan yang diperoleh dari hasil temuan dan rekomendasi yang diusulkan berdasarkan kesimpulan tersebut.

BAB II

RENCANA STRATEGIS DAN PENYUSUNAN PROGRAM PEMBANGUNAN

2.1 Definisi Rencana Strategis

Rencana strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD yang menggambarkan tentang permasalahan pembangunan daerah serta indikasi program kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan dimaksud secara berencana, bertahap dan berkesinambungan setiap tahunnya.

Renstra harus menyelenggarakan visi, misi, tujuan, strategi yang memuat kebijaksanaan desentralisasi yang diterapkan dalam rangka pengembangan Otonomi Daerah yang mempunyai tujuan akhir adalah meningkatkan dan mempercepat terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan yang merata dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

Renstra berkedudukan sebagai tolok ukur penilaian pertanggungjawaban Walikota kepada DPRD baik tahunan maupun pada akhir masa jabatan yang menyangkut semua pihak. Renstra berfungsi sebagai pedoman/acuan dalam setiap kegiatan pola pelaksanaan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta mengikat kepada seluruh kegiatan masyarakat Kota. Jangka waktu Renstra paling lama adalah 5 (lima) tahun.

2.2 Penyusunan Program Pembangunan

2.2.1 Perencanaan

Pengertian perencanaan dikemukakan oleh beberapa ahli, yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Perencanaan dibutuhkan karena kebutuhan pembangunan lebih besar dari sumber-sumber yang tersedia (Friedmann, 1987: 77). Melalui perencanaan ingin dirumuskan kegiatan pembangunan yang secara efisien dan efektif dapat memberikan hasil yang optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan mengembangkan potensi yang ada. Friedmann (1987: 58) menyatakan bahwa perencanaan merupakan kegiatan yang sistematis untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber-sumber yang tersedia dalam rangka meminimalkan konflik.

Sama halnya dengan Friedman, Dusseldorp (1980: 92) menyatakan bahwa secara harfiah perencanaan dapat diartikan sebagai proses kegiatan sebelum tindakan sesungguhnya dilakukan. Perencanaan tersebut dapat berupa satu kegiatan atau bagian dari satu kegiatan yang dilakukan secara sadar oleh manusia. Dalam lingkup pengertian yang umum, perencanaan dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia dengan memperhatikan segala keterbatasan dan pembatasan yang ada guna mencapai suatu tujuan secara efisien dan efektif (Sujarto, 1985: 97). Tjokroamidjojo (1996: 73) menyebutkan beberapa pengertian perencanaan, antara lain:

1. Perencanaan merupakan proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu.

2. Perencanaan merupakan suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efektif dan efisien.
3. Perencanaan pembangunan adalah suatu pengarahan penggunaan sumber-sumber pembangunan yang terbatas adanya untuk mencapai tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara lebih efisien dan efektif.

Sujarto (1990: 49) menyebutkan terdapat unsur-unsur pokok yang terkandung dalam perencanaan, yaitu:

1. Unsur keinginan atau cita-cita;
2. Unsur tujuan dan motivasi;
3. Unsur sumber daya alam, manusia, modal dan informasi;
4. Unsur upaya hasil guna dan dayaguna;
5. Unsur ruang dan waktu.

Perencanaan merupakan kegiatan penyiapan strategi (serangkaian rumusan tindakan) untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu. Dengan perkataan lain perencanaan merupakan penentuan tujuan pokok (tujuan utama) beserta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan pada prinsipnya merupakan kegiatan yang berorientasi pada masa depan, atau dengan perkataan lain perencanaan merupakan seperangkat kegiatan yang dilakukan sebelum kegiatan tersebut terjadi (Greed, 1996: 164).

Menurut Diaz (1983: 88) bahwa perencanaan perlu dilakukan oleh karena terbatasnya sumber daya (manusia, alam dan modal) yang dimiliki oleh manusia sedangkan kebutuhan yang harus dipenuhi tidak terbatas. Oleh karena itu perlu dilakukan perencanaan kegiatan yang akan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan

dengan memperhatikan sumber daya yang tersedia dengan menentukan urutan prioritas kegiatan. Ditambahkan oleh Saul M Katz, jika perencanaan dipandang sebagai alat atau cara untuk mencapai tujuan pembangunan dengan lebih baik, maka sangat kuat alasannya mengapa perencanaan itu sangat diperlukan (Tjokroamidjojo, 1996: 86):

1. Dengan adanya perencanaan diharapkan terdapat suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan pembangunan.
2. Dengan perencanaan maka dilakukan suatu perkiraan (*forecasting*) terhadap hal-hal dalam masa pelaksanaan yang akan dilalui. Perkiraan dilakukan mengenai potensi-potensi dan prospek-prospek perkembangan tetapi juga mengenai hambatan-hambatan dan resiko-resiko yang mungkin dihadapi. Perencanaan mengusahakan supaya ketidakpastian dapat dibatasi sedikit mungkin.
3. Perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara yang terbaik atau kesempatan untuk memilih kombinasi cara terbaik.
4. Dengan perencanaan, dilakukan penyusunan skala prioritas.
5. Dengan adanya rencana maka akan ada suatu alat pengukur atau standar untuk mengadakan pengawasan dan evaluasi.

Perencanaan menurut Conyers (1994: 162) didefinisikan sebagai suatu proses yang bersinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan

tertentu pada masa yang akan datang. Berdasarkan definisi tersebut berarti ada 4 elemen dasar perencanaan yaitu:

1. Merencana berarti memilih. Perencanaan merupakan proses memilih diantara berbagai kegiatan yang diinginkan karena tidak semua yang diinginkan tersebut dapat dilakukan dan tercapai secara simultan.
2. Perencanaan merupakan alat pengalokasian sumber daya yang berarti bahwa perencanaan mencakup proses pengambilan keputusan tentang bagaimana penggunaan sumber daya yang tersedia sebaik-baiknya.
3. Perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan.
4. Perencanaan untuk masa depan, dalam arti bahwa tujuan-tujuan perencanaan dirancang untuk dicapai pada masa yang akan datang dan oleh karena itu perencanaan berkaitan dengan masa depan.

Sedangkan menurut Kunarjo (1992: 28) pada dasarnya secara umum perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses penyiapan seperangkat keputusan untuk dilaksanakan pada waktu yang akan datang yang diarahkan pada pencapaian sasaran tertentu. Dengan definisi tersebut maka perencanaan mempunyai unsur-unsur:

1. Berhubungan dengan hari depan,
2. Mendesain seperangkat kegiatan secara sistematis,
3. Dirancang untuk mencapai tujuan tertentu.

Dikemukakan bahwa perencanaan merupakan bagian dari salah satu tipe pembangunan (Hischman, 1973: 68). Perencanaan dilaksanakan karena diyakini bahwa dengan melalui perencanaan yang dinyatakan secara mandiri sebagai

bagian dari proses pembangunan, diharapkan pembangunan akan mencapai hasil yang lebih baik. Selanjutnya dikatakan bahwa dalam proses pembangunan, perencanaan merupakan sarana campur tangan pemerintah dalam mengarahkan dan mengendalikan keadaan menuju perubahan sesuai dengan yang diharapkan dan bentuk sarananya adalah program dan proyek.

Berdasarkan beberapa pengertian dan unsur pokok perencanaan, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya perencanaan mengandung beberapa hal pokok, antara lain:

1. Ancangan bertindak di masa yang akan datang sehingga merupakan cita-cita yang bertujuan, bersasaran dan berstrategi kebijaksanaan;
2. Untuk merealisasikan cita-cita dan tujuan diperlukan minimasi penggunaan sumber-sumber dan maksimasi hasil;
3. Menggunakan matra waktu dan ruang.

Dengan memperhatikan apa yang telah diuraikan diatas, maka fungsi perencanaan dalam proses pembangunan adalah sangat diperlukan dan mempunyai fungsi yang strategis, karena tanpa adanya perencanaan yang baik yang pada hakekatnya adalah merupakan alat atau cara untuk mencapai tujuan pembangunan, maka kegiatan tidak akan dapat dilaksanakan dengan berdaya guna dan berhasil guna dan akibatnya akan terjadi pemborosan sumber daya.

2.2.2 Pembangunan

Pembangunan pada dasarnya adalah usaha untuk memperbaiki suatu kondisi, bukan justru menghasilkan hal-hal yang merugikan, misalnya

meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat yang terbelakang menjadi masyarakat yang maju, dari negara dengan tingkat ekonomi rendah menjadi tinggi, dari kondisi yang tidak aman menjadi aman, dan sebagainya. Oleh karena itu perlu dirumuskan terlebih dahulu visi, misi, dan tujuan pembangunan agar lebih fokus dan tidak salah sasaran.

Todaro dalam Bryant dan White (1987: 65) mengemukakan bahwa pembangunan adalah proses multidimensi yang mencakup perubahan-perubahan penting dalam struktur sosial, sikap-sikap rakyat dan lembaga-lembaga nasional dan juga akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan absolut.

Secara ringkas, pembangunan dapat diartikan sebagai proses rekayasa untuk meningkatkan kualitas hidup dengan memanfaatkan berbagai sumber daya pendukungnya melalui perubahan tatanan lingkungan hidup serta kehidupan secara keseluruhan. Untuk mencapai tujuan-tujuan yang dicanangkan pembangunan tersebut maka dilaksanakan berbagai program yang terdiri dari berbagai proyek atau kegiatan.

2.3 Perencanaan Pembangunan

Pada umumnya perencanaan pembangunan harus memiliki, mengetahui dan memperhitungkan beberapa unsur pokok, yaitu (Friedmann, 1987: 42):

1. Tujuan akhir yang dikehendaki;
2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
3. Jangka waktu untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut;

4. Masalah-masalah yang dihadapi;
5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
6. Kebijakan-kebijaksanaan untuk melakukannya;
7. Orang, organisasi atau badan pelaksananya;
8. Mekanisme pemantauan dan evaluasi.

Dalam konteks yang sama, menyebutkan unsur-unsur perencanaan pembangunan, meliputi (Tjokroamidjojo, 1996: 90):

1. Kebijakan dasar atau strategi dasar yang juga disebut sebagai tujuan, arah, sasaran dan prioritas pembangunan;
2. Kerangka rencana makro yang dihubungkan dengan berbagai variabel pembangunan;
3. Perkiraan sumber-sumber pembangunan;
4. Konsistensi uraian tentang kebijakan;
5. Program investasi;
6. Administrasi pembangunan.

Perencanaan pembangunan cenderung untuk dianggap bukan hanya sebagai kegiatan terbatas saja, tetapi sebagai bagian dari suatu proses pembangunan yang kompleks, melibatkan beberapa kegiatan berikut (Conyers, 1994 :85):

1. Identifikasi tujuan umum dan kenyataan yang ada.
2. Formulasi strategi pembangunan yang luas guna mengatasi kenyataan yang ada.
3. Penterjemahan strategi yang ada ke dalam bentuk rencana dan proyek.

4. Implementasi program pembangunan.
5. Pemantauan terhadap implementasi dan hambatan yang timbul untuk pencapaian tujuan serta kenyataan.

Perencanaan pembangunan dapat disusun berdasarkan empat kriteria yaitu jangka waktu, ruang lingkup, tingkat keluwesan dan arus informasi. Dilihat dari jangka waktu, perencanaan pembangunan dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu (Kunarjo, 1992: 73):

1. Perencanaan Jangka Panjang (sekitar 10 sampai dengan 25 tahun)

Dalam perencanaan jangka panjang ini sasarannya belum dapat disajikan secara kuantitatif, tetapi biasanya hanya dicerminkan dengan sasaran yang kualitatif yaitu berupa kebijakan yang akan ditempuh. Hal ini wajar mengingat dalam kurun waktu yang panjang, faktor-faktor eksternal sulit untuk diperhitungkan sehingga sasaran secara kuantitatif belum bisa disajikan.

2. Perencanaan Jangka Menengah

Perencanaan jangka menengah mempunyai kurun waktu 4 sampai dengan 6 tahun. Dalam perencanaan jangka menengah ini, walaupun sasarannya masih bersifat umum, tetapi secara kasar telah dapat dilihat arah sasaran sektor dan subsektornya.

Perencanaan jangka menengah biasanya dikaitkan dengan kebutuhan politis yang didasarkan karena jangka waktu yang disesuaikan dengan jabatan para penguasa pemerintahan. Biasanya jangka waktu lima tahunan adalah jangka waktu yang ideal mengingat jangka waktu tersebut cukup untuk memberi

waktu bagi para penguasa untuk mengelola rencana program dan proyek pembangunan yang telah disusun.

3. Perencanaan Jangka Pendek

Perencanaan jangka pendek atau dapat juga disebut Perencanaan Operasional Tahunan ini biasanya mempunyai kurun waktu 1 tahun. Karena jangka waktunya yang pendek maka sasaran-sasarannya dapat disajikan secara lebih konkrit.

Dilihat dari sudut penyimpangan antara rencana dan sasaran yang akan dicapai, perencanaan jangka pendek mempunyai penyimpangan yang lebih kecil dibandingkan dengan perencanaan jangka menengah dan jangka panjang.

Walaupun tampaknya terpisah-pisah, tetapi antara perencanaan jangka panjang, menengah dan pendek semuanya saling berkaitan. Perencanaan jangka pendek merupakan penjabaran dari perencanaan jangka menengah, dan selanjutnya perencanaan jangka menengah merupakan bagian dari perencanaan jangka panjang. Jadi sasaran-sasaran dalam perencanaan pembangunan jangka pendek tidak terlepas dari garis-garis kebijakan yang ditentukan dalam perencanaan jangka menengah maupun jangka panjang.

Selanjutnya dilihat dari prosedurnya maka perencanaan pembangunan terdiri dari 2 pendekatan, yaitu pendekatan perencanaan dari atas ke bawah (*top-down planning*) dan pendekatan perencanaan dari bawah ke atas (*bottom-up planning*). Yang disebut "atas" disini dapat berarti pemerintah pusat atau unit perencanaan nasional atau juga dapat berarti perencanaan makro. Sebaliknya yang

disebut “bawah” dapat berarti pemerintah daerah atau departemen atau juga dalam tingkat mikro/proyek (Kunarjo, 1992: 52)

Di dalam perencanaan regional, pendekatan perencanaan dari atas ke bawah disebut “prosedur fungsional”. Menurut prosedur ini, rencana nasional atau sejenisnya menentukan fungsi-fungsi yang mungkin dijalankan oleh berbagai wilayah dalam proses pembangunan secara keseluruhan selama periode rencana dalam waktu yang akan datang. Menurut prosedur ini pula, rencana nasional merupakan kerangka dasar bagi kegiatan-kegiatan pembangunan nasional yang kegiatan-kegiatannya secara terperinci dirumuskan dalam rencana sektoral dan regional dan merupakan kerangka dasar bagi rencana-rencana, program dan proyek lokal atau daerah.

Sedangkan pendekatan perencanaan dari bawah ke atas disebut “prosedur berdasarkan sumber daya”, sebab rencana pembangunan didasarkan pada penilaian mengenai potensi wilayah (fisik, ekonomi dan sosial) agar dapat memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan menjamin partisipasi penduduk setempat, dan merupakan rencana-rencana lokal yang dirumuskan secara mendasar baik oleh penduduk setempat atau oleh para pimpinan pemerintahan setempat (Dusseldorp, 1980: 187).

Namun kedua pendekatan perencanaan ini memiliki kelemahan masing-masing. Pendekatan perencanaan dari atas ke bawah apabila tidak memperhatikan arus informasi yang didukung oleh perencanaan dari bawah ke atas, maka pendekatan itu hanya akan menghasilkan dokumen perencanaan teoritis atau hanya menghasilkan proyek-proyek yang tidak efisien karena proyek yang

dilaksanakan berlebihan atau tidak dibutuhkan oleh rakyat setempat sehingga mengakibatkan pemborosan dana dan juga rakyat setempat merasa tidak berkepentingan untuk berperan serta.

Demikian pula pendekatan perencanaan dari bawah ke atas, apabila tidak selaras dengan perencanaan dari atas ke bawah, maka sebagian besar rencana lokal itu tidak dapat dilaksanakan dan ini akibatnya akan mengecewakan rakyat (Kunarjo, 1992: 75). Dan selanjutnya menurut ESCAP (*Economic and Social Commission for Asia and Pacific*) ada dua hal kelemahan sistem perencanaan dari bawah ke atas yaitu sangat kurangnya tenaga-tenaga perencana yang cukup terlatih dan kurangnya data dan informasi yang cukup tentang daerah. Oleh karena itu, perencanaan di negara yang sedang berkembang selalu mempunyai kecenderungan "*top-down bias*" (ESCAP, 1979).

Oleh karena itu, dalam perencanaan pada tingkat wilayah kedua pendekatan di atas harus dilaksanakan secara terpadu yaitu dengan merumuskan perencanaan program dan proyek berdasarkan aspirasi masyarakat dan potensi wilayah berdasarkan pendekatan dari bawah ke atas yang diintegrasikan menjadi suatu kerangka dasar regional yang mendukung tujuan nasional yang telah dirumuskan berdasarkan pendekatan dari atas ke bawah, dengan mengatasi kelemahan masing-masing pendekatan perencanaan pembangunan diatas. Hal ini merupakan tugas para perencana regional untuk memadukan kedua pendekatan perencanaan pembangunan diatas dengan menyusun rencana pembangunan regional yang mempergunakan secara optimal potensi regional dan

menyesuaikannya dengan kerangka dasar yang terdapat pada tingkat nasional (Dusseldorp, 1980: 128).

Perencanaan pembangunan dapat dinilai baik jika mempunyai beberapa persyaratan sebagai berikut (Kunarjo, 2002: 79):

1. Perencanaan harus didasari dengan tujuan pembangunan,
2. Perencanaan harus konsisten dan realistis,
3. Perencanaan harus dibarengi dengan pengawasan yang kontinu,
4. Perencanaan harus mencakup aspek fisik dan pembiayaan,
5. Para perencana harus memahami berbagai perilaku dan hubungan antar variabel ekonomi,
6. Perencanaan harus mempunyai koordinasi.

Dalam konteks perencanaan daerah, terdapat dua jenis perencanaan yaitu Pola Dasar Pembangunan (Poldas) yang merupakan produk rencana pembangunan daerah untuk jangka panjang, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai rencana spasial (ruang) jangka panjang yang merupakan matra (dimensi) spasial dari Pola Dasar Pembangunan. Penjabaran rencana dalam bentuk pembangunan jangka menengahnya dikenal dengan nama Program Pembangunan Daerah (Propeda). Dari Propeda tersebut disusun rencana atau program tahunan daerah yang terdiri dari berbagai program/proyek pembangunan. Dalam penentuan proyek tersebut, dilakukan pula proses penganggarannya yang dikenal dengan istilah Rapat Koordinasi Pembangunan (Rakorbang). Berdasarkan hasil Rakorbang tersebut kemudian akan dilakukan pembahasan untuk menghasilkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

2.4 Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan

Penyusunan perencanaan pembangunan di daerah, didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah (P5D). dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa mekanisme perencanaan di daerah dilakukan melalui pendekatan perencanaan dari bawah ke atas dan pendekatan perencanaan dari atas ke bawah. Pendekatan perencanaan dari atas ke bawah berorientasi pada pendekatan sektoral yang tersentralistik, sedangkan pendekatan bottom-up berorientasi pada peran serta komunitas atau masyarakat dalam pembangunan. Pengalaman menunjukkan bahwa pendekatan perencanaan dari atas ke bawah telah menimbulkan berbagai permasalahan di daerah karena kadang-kadang pendekatan sektoral tidak memperhatikan permasalahan dan potensi yang ada di suatu daerah. Di sisi lain, permasalahan dan kondisi di setiap daerah berbeda satu dengan lainnya karena setiap daerah memiliki kekhasan masing-masing.

Dalam peraturan tersebut ditetapkan bahwa dokumen perencanaan di daerah baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota, meliputi:

1. Pola Dasar Pembangunan (Poldas) Provinsi, merupakan garis-garis besar kebijaksanaan pembangunan provinsi sebagai pernyataan kehendak rakyat di daerah bersangkutan yang berpedoman pada Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan potensi daerah.

2. Pola Dasar Pembangunan (Poldas) Kabupaten/kota, merupakan penjabaran lebih lanjut dari Poldas provinsi sesuai dengan aspirasi dan kehendak masyarakat dalam rangka operasionalisasi GBHN di kabupaten/kota.
3. Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah (Repelitada) atau sekarang dikenal dengan Program Pembangunan Daerah (Propeda), merupakan dokumen perencanaan jangka menengah sebagai penjabaran pola dasar pembangunan daerah. Propeda merupakan perumusan tujuan umum dan tujuan fungsional pembangunan daerah yang berisikan indikasi program-program pembangunan.
4. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada), merupakan perumusan kebijaksanaan operasional dan bersifat konkrit untuk menjadi pedoman penyusunan program dan proyek bagi semua instansi pemerintah di tingkat daerah.
5. Daftar Usulan Proyek (DUP) dalam bentuk usulan-usulan proyek yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya. Usulan proyek tersebut didalamnya memberi indikasi tentang nama proyek, tujuan, lokasi, biaya, waktu, sasaran, tolok ukur dan ketatalaksanaan.
6. Daftar Isian Proyek (DIP), berkedudukan sebagai landasan hukum untuk pelaksanaan, tolok ukur dan pengendalian proyek serta berfungsi sebagai pedoman bagi perumusan rencana operasional proyek.

Terdapat beberapa dokumen penting dalam perencanaan pembangunan di Indonesia yang selalu dijadikan acuan dalam mekanisme perencanaan pembangunan, seperti yang ditunjukkan pada Tabel II.1 berikut ini.

2.5 Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan

Salah satu tujuan dikeluarkannya Permendagri Nomor 9 Tahun 1982 adalah tercapainya keterpaduan program/proyek pembangunan di daerah melalui mekanisme dan forum yang telah ditentukan. Mekanisme dan forum tersebut akan membahas usulan program/proyek untuk menyusun rencana pembangunan tahunan yang akan dilaksanakan pada tahun selanjutnya.

TABEL II.1
DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA

Tingkat Rencana	Periode Rencana (jangka waktu)			Pendanaan
	Panjang	Menengah	Pendek	
Nasional Propinsi	GBHN Renstra Prop	Propenas Propeda Prop	Repeta Repetada Prop	APBN APBD Prop
Kabupaten/Kota	Poldas Kab/Kota	Properda Kab/Kota	Repetada Kab/kota	APBD Kab/Kota
Kecamatan	Pola Pengembangan Kecamatan	Temukarya UDKP	RPTK	
Desa/Kelurahan	Pola Pengembangan Desa	Musbangdes	RPTK/D	

Sumber: Permendagri No.9 Tahun 1982

Berpedoman pada Permendagri Nomor 9 Tahun 1982, pada dasarnya perencanaan pembangunan tahunan di daerah harus melalui 3 tahapan, yaitu:

1. Evaluasi dan analisa keadaan;

Tahapan ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi tentang pelaksanaan proyek tahun lalu, dan mengidentifikasi masalah-masalah yang terdapat pada pelaksanaan proyek tahun sebelumnya untuk bahan pertimbangan penyusunan proyek tahun yang akan datang.

2. Penyusunan Rencana Umum Pembangunan Tahunan Daerah;

Tahapan ini disusun berdasarkan hasil evaluasi tahap pertama yang merupakan kerangka makro berisi tujuan, arah, sasaran, skala prioritas, strategi dan kebijaksanaan pembangunan di daerah.

3. Penyusunan program/proyek secara terpadu.

Pada tahapan ini dimaksudkan untuk menampung aspirasi dari bawah (*bottom-up*) dan memadukan kebijaksanaan dari atas (*top-down*). Kegiatan ini dalam rangka penyusunan APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota dan swasta/perbankan maupun proyek murni yang dibiayai oleh masyarakat.

Untuk menampung keinginan masyarakat dalam pembangunan ditempuh sistem perencanaan dari bawah ke atas (*bottom-up*). Namun demikian penyusunan proyek yang akan dibangun di daerah juga harus merupakan kebijakan nasional. Dengan kata lain sistem perencanaan dari atas ke bawah (*top-down*) juga tidak dapat ditinggalkan. Melalui 3 tahapan tersebut di atas diharapkan tercapainya keseimbangan dan keserasian antara perencanaan dari atas ke bawah dan perencanaan dari bawah ke atas.

Untuk mendapatkan informasi mengenai proyek-proyek yang menjadi keinginan masyarakat serta meningkatkan koordinasi dalam pengusulan perencanaan daerah maka ditempuh secara bertahap musyawarah serta rapat koordinasi dari tingkat desa/kelurahan sampai tingkat nasional. Musyawarah dan rapat koordinasi tersebut membicarakan beberapa keinginan masyarakat yang dicerminkan dengan usulan proyek. Permendagri No. 9 Tahun 1982 mengamanatkan adanya keserasian dan keseimbangan antara *top down* dengan

bottom up yang dapat dicapai melalui tahapan atau mekanisme kerja sebagai berikut:

1. Musyawarah pembangunan (Musbang) tingkat desa/kelurahan;
2. Temu karya pembangunan tingkat kecamatan dalam bentuk diskusi Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP);
3. Rapat Koordinasi Pembangunan (Rakorbang) Kabupaten / kota;
4. Rapat Koordinasi Pembangunan (Rakorbang) Provinsi;
5. Konsultasi regional pembangunan;
6. Konsultasi nasional atau Rapat Koordinasi Pembangunan Nasional

Pelaksanaan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang dilakukan melalui serangkaian tahapan dan berjenjang dari tingkat desa/kelurahan sampai dengan tingkat nasional merupakan upaya untuk lebih mengefektifkan perencanaan pembangunan daerah yang komprehensif dan terpadu sehingga secara bertahap dapat dicapai titik temu antara aspirasi dan kebutuhan daerah dengan kebijaksanaan dan strategi pembangunan nasional.

Memperhatikan mekanisme kerja sistem perencanaan tersebut diatas, khususnya melalui pendekatan perencanaan dari bawah ke atas, kegiatan perencanaan diawali dengan perencanaan pembangunan pada tingkat desa dan kecamatan, dilanjutkan pada tingkat pemerintahan yang lebih tinggi yaitu kabupaten/kota, provinsi bahkan sampai ke tingkat nasional. Ini berarti bahwa mekanisme perencanaan tersebut secara keseluruhan merupakan satu kesatuan proses perencanaan, berjenjang dan dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang berbeda pada setiap hirarki/jenjang.

Meskipun secara keseluruhan, dari tingkat desa sampai ke tingkat nasional merupakan satu kesatuan proses perencanaan, tetapi pada setiap hirarki dilakukan oleh unsur-unsur yang berbeda, dan ini dapat mengakibatkan sulitnya untuk dicapai suatu hasil pembahasan yang utuh atau dengan kata lain dapat menimbulkan perbedaan-perbedaan prioritas dalam usulan rencana program/proyek pembangunan yang diajukan pada setiap hirarki.

Selain itu, rencana pembangunan yang telah dibuat oleh desa melalui Musbangdes yang berupa usulan rencana proyek yang akan dibiayai melalui dana pemerintah, tidak dengan sendirinya dapat langsung dilaksanakan begitu saja karena terlebih dahulu harus melalui prosedur yang panjang dan beberapa tahap penyaringan yang bertingkat dan bahkan sampai harus melalui penyaringan pada tingkat pusat (Bappenas). Hasil proses penyaringan ini sering mengecewakan rakyat desa karena proyek yang mereka usulkan berubah jenisnya atau bahkan ditolak (Soetrisno, 1988: 86). Sering pula proses perencanaan dari bawah ke atas ini dikalahkan oleh superioritas rencana sektoral yang bersifat perencanaan dari atas ke bawah, artinya dalam waktu yang sama pemerintah pusat melalui jalur departemen (sektoral) juga menyusun rencana pembangunan sektoral yang tentunya akan dilaksanakan di daerah dengan sumber pendanaan APBN. Perencana daerah sering harus atau bahkan tinggal menunggu rencana yang telah dibuat oleh pusat dan kemudian menyesuaikan perencanaan asli daerahnya dengan rencana yang telah disusun oleh pusat (Indrawati, 1994: 75).

Penentuan lokasi suatu proyek yang tepat dapat lebih meningkatkan efisiensi. Pemilihan lokasi proyek banyak tergantung dari macam proyek,

ketergantungan proyek dengan proyek lain, macam input yang diperlukan dan jenis outputnya. Kesalahan dalam pemilihan lokasi proyek, maka kerugian akan diperoleh selama proyek ini beroperasi.

2.6 Variabel Penelitian

TABEL II.2
VARIABEL PENELITIAN

Kegunaan	Proses	Variabel / Data	Pengumpulan Data	Teknik Analisis
Kesesuaian/ ketidakesesuaian Renstra dgn usulan program Dinas / Badan	Analisis Kesesuaian Pelaksanaan dengan Renstra	Renstra Indikasi Program Pembangunan Usulan rencana pembangunan Peraturan tentang mekanisme penyusunan program	Sekunder	Deskriptif
Mengetahui tingkat pemanfaatan Renstra dalam penyusunan usulan program ..	Pengelompokan Jawaban Tabulasi silang	Penggunaan Renstra Pengetahuan Adanya Renstra Pemahaman terhadap materi Perhatian terhadap Renstra	Primer Sekunder	Deskriptif
Mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi tidak dimanfaatkannya Renstra dalam penyusunan usulan program	Pengelompokan jawaban Tabulasi silang Distribusi frekuensi	Penggunaan Renstra Pengetahuan Adanya Renstra Pemahaman terhadap materi Perhatian terhadap Renstra	Primer Sekunder	Deskriptif

Sumber: Hasil Analisis, 2005

BAB III

GAMBARAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG DAN PROSES PENYUSUNAN PROGRAM PEMBANGUNAN KOTA TANJUNGPINANG

Sejak dikeluarkan UU No. 5 tahun 2001 tanggal 21 Juni 2001 status Kota Tanjungpinang berubah dari Kota Administratif Tanjungpinang menjadi Kota Otonomi Tanjungpinang. Dengan meningkatnya status Kota Tanjungpinang tersebut menghendaki perhatian yang lebih di bidang perencanaan pembangunan kota untuk mengantisipasi perkembangan Kota yang memiliki fungsi selain sebagai kota otonom juga menjadi ibukota provinsi Kepulauan Riau.

3.1 Karakteristik Fisik dan Geografis Kota Tanjungpinang

Kota Tanjungpinang berada di Pulau Bintan dengan letak geografis berada pada $0^{\circ}51'$ sampai dengan $0^{\circ}59'$ Lintang Utara dan $104^{\circ}23'$ sampai dengan $104^{\circ}34'$ Bujur Timur.

Batas-batas wilayah Administrasi Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Kepulauan Riau
dan Kota Batam.
- Sebelah Selatan : Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Kepulauan Riau.
- Sebelah Barat : Kecamatan Galang Kota Batam.
- Sebelah Timur : Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Kepulauan Riau.

Kota Tanjungpinang memiliki luas wilayah daratan 239,50 Km² dan lautan 573,20 km dengan keadaan geologis sebahagian berbukit-bukit dan lembah yang landai sampai ke tepi laut. sebagian merupakan dataran rendah, atau kawasan rawa/bakau, sehingga memudahkan upaya pembangunan Kota.

Tanahnya Pedsolik kering merah sehingga kurang baik untuk pertanian, Iklim tropis basah dengan temperatur 18⁰ C - 30⁰ C, tekanan udara 1.010,2 MBS – 1.013,7 MBS, Musim hujan September-Juni, musim Kemarau Juli-Agustus. Terdapat beberapa buah pulau yang salah satunya adalah pulau Penyengat yang pernah menjadi Pusat Kerajaan Riau Awal abad 20.

Kota Otonom Tanjungpinang terbagi atas 4 Kecamatan dan terdiri dari 18 Kelurahan dan Desa yang antara lain :

Kecamatan Tanjungpinang Barat :

1. Kelurahan Tanjungpinang Barat
2. Kelurahan Kemboja
3. Kelurahan Kampung Baru
4. Kelurahan Bukit Cermin

Kecamatan Tanjungpinang Kota :

1. Kelurahan Tanjungpinang Kota
2. Desa Penyengat
3. Desa Kampung Bugis
4. Desa Senggarang

Kecamatan Bukit Bestari :

1. Kelurahan Tanjungpinang Timur

2. Kelurahan Tanjung Unggat
3. Kelurahan Tanjungayun Sakti
4. Kelurahan Dompok
5. Kelurahan Sei jang

Kecamatan Tanjungpinang Timur :

1. Kelurahan Kampung Bulang
2. Kelurahan Melayu Kota Piring
3. Kelurahan Air Raja
4. Kelurahan Pinang Kencana
5. Kelurahan Batu Sembilan

Motto Kota Tanjungpinang **“JUJUR BERTUTUR BIJAK BERTINDAK”** mengandung arti amanah dan bijaksana dalam menyelenggarakan pemerintah dan sebagai pelayan masyarakat dapat memberikan kekekalan dan keabadian yang nyata bagi masyarakat Kota Tanjungpinang.

3.2 Rencana Strategis (Renstra) Kota Tanjungpinang Tahun 2003 - 2007

3.2.1 Proses Penyusunan Renstra

3.2.1.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan yang akan dicapai dalam melaksanakan Renstra Kota Tanjungpinang Tahun 2003 – 2007 adalah :

1. Menjabarkan visi dan misi pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah dan Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kota Tanjungpinang Tahun 2003 – 2007 ke dalam bentuk

program – program dan kegiatan pembangunan yang relevan dengan situasi, kondisi, permasalahan dan potensi yang ada selama lima tahun (2003 – 2007)

2. Sebagai acuan utama bagi seluruh Dinas / Instansi dan masyarakat Kota Tanjungpinang dalam menyusun program – program dan kegiatan pembangunan selama lima tahun ke depan yang akan disusun ke dalam APBD Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2003-2007.
3. Sebagai dasar bagi Walikota Tanjungpinang untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban pada setiap tahun anggaran maupun pada akhir masa jabatan yakni pada tahun 2007 mendatang.

Sedangkan sasaran yang hendak dicapai adalah :

1. Tersusunnya rencana Pemerintahan Kota Tanjungpinang yang bersifat strategis untuk mewujudkan visi dan misi Kota Tanjungpinang melalui berbagai kegiatan pembangunan daerah.
2. Terselenggaranya pemerintahan daerah Kota Tanjungpinang yang demokratis, desentralistik dan berorientasi pada transparansi dan pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan perencanaan yang komprehensif dan terpadu di seluruh Kota Tanjungpinang.

3.2.1 2 Landasan Penyusunan

1. Pancasila sebagai landasan idiil
2. Undang – Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional

3. GBHN, Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 dan Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Tanjungpinang, serta Program Pembangunan Daerah Kota Tanjungpinang sebagai landasan Operasionil.

3.2.1.2.1 Visi dan Misi Pembangunan Daerah

Visi pembangunan Kota Tanjungpinang adalah **"Terwujudnya Kota Tanjungpinang sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa Industri, Pariwisata serta Pusat Budaya Melayu dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis Sejahtera Lahir dan Batin pada tahun 2020"**.

Untuk merealisasikan visi Kota Tanjungpinang tersebut, maka misi pembangunan yang diemban adalah :

1. Mengembangkan dan meningkatkan mutu sumber daya manusia agar mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Memberdayakan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi kota Tanjungpinang, untuk mengembangkan potensi ekonomi daerah yang berbasis kerakyatan, dengan bertumpu pada mekanisme pasar yang adil, efektifitas pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing dan berkelanjutan.
3. Mengembangkan tata nilai kebudayaan melayu dan kaedah-kaedah keagamaan dalam rangka menjadikan Kota Tanjungpinang sebagai Pusat Kebudayaan Melayu dan pengembangan pariwisata di kawasan Riau kepulauan.
4. Mengembangkan prasarana, sarana dan utilitas kota dalam rangka pengembangan wilayah, pengembangan kegiatan ekonomi, sosial, budaya dan

kawasan tertinggal yang bertumpu pada agribisnis dan agroindustri yang berwawasan lingkungan.

5. Menjalin dan mengembangkan hubungan kerjasama di dalam maupun dengan luar Negeri untuk memperlançar akses komunikasi dan transformasi guna mengefektifkan pengelolaan sumber daya alam, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta peningkatan serta pengembangan potensi di bidang ekonomi, sosial dan budaya Melayu.
6. Memelihara dan memantapkan stabilitas politik, ekonomi, social, keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat melalui upaya penegakan hukum secara konsisten dan transparan, serta pengembangan kehidupan masyarakat kota yang agamis dan harmonis dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya Melayu yang toleran dan terbuka.
7. Meningkatkan kualitas serta kuantitas aparatur Pemerintahan Kota untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan kota agar lebih efektif handal dan professional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga mampu mengelola dan mengembangkan sumber daya secara berdaya guna dan berhasil guna bagi kemajuan, peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta pengembangan kota.

3.2.1.3 Agenda Pembangunan Kota Tanjungpinang

Dalam Rencana Strategis Kota Tanjungpinang tahun 2003-2007 perlu diletakkan prioritas pembangunan Kota Tanjungpinang. Prioritas pembangunan Kota Tanjungpinang didasarkan pada visi, misi serta faktor lingkungan internal

dan lingkungan eksternal Kota Tanjungpinang. Prioritas pembangunan Kota Tanjungpinang ini merupakan agenda pembangunan Kota Tanjungpinang untuk lima tahun mendatang. Adapun agenda pembangunan yang juga merupakan prioritas pembangunan Kota Tanjungpinang ke depan adalah:

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Program-program strategis agenda pengembangan sumber daya manusia yakni pembangunan:

- a. Agama
- b. Pendidikan
- c. Kesehatan
- d. Tenaga Kerja
- e. Kesejahteraan sosial
- f. Kependudukan
- g. Aparatur pemerintah
- h. Pemberdayaan perempuan, anak dan remaja
- i. Pemuda
- j. Ilmu pengetahuan dan teknologi
- k. Olah raga
- l. Kebudayaan
- m. Hukum
- n. Politik
- o. Keamanan
- p. Informasi dan media massa

2. Pengentasan Kemiskinan dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan

Program-program strategis agenda pengentasan kemiskinan dan pengembangan ekonomi kerakyatan yakni pembangunan:

- a. Industri
- b. Pertanian tanaman pangan
- c. Perkebunan
- d. Peternakan
- e. Perikanan
- f. Kehutanan
- g. Perdagangan
- h. Pengembangan usaha daerah
- i. Koperasi dan usaha kecil menengah
- j. Pertambangan
- k. Kepariwisataaan
- l. Kelautan dan daerah pesisir
- m. Lingkungan hidup

3. Pengembangan Infrastruktur

Program-program strategis agenda pengembangan infrastruktur yakni pembangunan:

- a. Penataan ruang dan pertanahan
- b. Transportasi
- c. Kelistrikan
- d. Air

e. Komunikasi

3.2.2 Mekanisme Penyelenggaraan Renstra

Pencapaian sasaran strategis tahun 2003-2007 ditetapkan dalam beberapa program strategis dan program-program yang terkait dengan agenda pembangunan sebagai program prioritas dalam Rencana Strategis Kota Tanjungpinang Tahun 2003-2007.

Sasaran strategis RENSTRA Kota Tanjungpinang tahun 2003-2007 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Walikota Tanjungpinang. Dalam pelaksanaan sehari-hari dibantu oleh Sekretaris Daerah, para Asisten, para Kepala Badan serta para Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Setiap unit kerja menjabarkan RENSTRA Kota Tanjungpinang tahun 2003-2007 pada unit kerjanya masing-masing sesuai dengan tanggung jawabnya.

Upaya pencapaian sasaran strategis pada RENSTRA Kota Tanjungpinang Tahun 2003-2007 melalui kegiatan strategis yang penerapannya dilaksanakan melalui berbagai kegiatan dengan pembiayaan oleh Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang dan masyarakat/swasta.

Target dan sasaran strategis pada RENSTRA Kota Tanjungpinang tahun 2003-2007 meliputi sasaran strategis Walikota Tanjungpinang dan juga merupakan sasaran kerja semua unit kerja dalam lingkup Pemerintah Kota Tanjungpinang. Untuk itu agar setiap unit kerja menjabarkan sasaran-sasaran strategis tersebut menjadi kegiatan strategis yang layak dan bisa diterapkan sesuai dengan tugas masing-masing.

Pengukuran indikator kinerja dan kebijakan serta program dievaluasi berdasarkan bobot pencapaian yang tercantum dalam Renstra Kota Tanjungpinang, sementara capaian pengukuran indikator kinerja kegiatan dievaluasi berdasarkan Renstra Dinas, Badan dan Unit Kerja Kota Tanjungpinang. Oleh karena itu tugas pokok masing-masing Komisi DPRD Kota Tanjungpinang diharapkan mengevaluasi indikasi kerja kegiatan mitra kerjanya, untuk menetapkan bobot capaian indikator kinerja kegiatan, program dan kebijakan tersebut.

3.3 Strategi Kebijakan Sektoral Kota Tanjungpinang

Berdasarkan Renstra Kota Tanjungpinang Tahun 2003-2007 telah disebutkan strategi kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilakukan yang meliputi bidang Ekonomi, Infrastruktur dan Permukiman, Pemerintahan, Pembangunan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Sosial Budaya, dan Politik. Secara lebih rinci strategi kebijakan sektoral tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sektor Industri

- a. Menumbuhkembangkan industri kecil, industri rumah tangga, industri pedesaan dengan peningkatan keterampilan, penguatan modal, peralatan, magang dan manajemen.
- b. Memanfaatkan dan mengolah bahan lokal dari hasil pertanian untuk kebutuhan lokal, dalam negeri dan ekspor dengan penguasaan teknologi.

- c. Penguatan struktur industri yang lebih baik dan menciptakan keterkaitan yang mendukung dan menguntungkan antar sektor, dan strata usaha dalam memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, mendukung ekspor dan pariwisata dan kegiatan lainnya sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan mendukung laju pertumbuhan ekonomi.
- d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor industri, perdagangan, koperasi dan penanaman modal daerah.
- e. Mengembangkan usaha dan sarana Indagkop dan PMD.
- f. Memperkuat struktur Indagkop dan PMD dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui; pengembangan kawasan industri, pengembangan dan pemasaran industri kecil dan terpadu, pengembangan koperasi sebagai Soko Guru perekonomian daerah, pengkajian prioritas pengembangan Indagkop dan PMD, serta memfasilitasi hubungan kemitraan antara pengusaha kecil, menengah, dan besar di sektor Indagkop.
- g. Meningkatkan penanaman modal daerah
- h. Meningkatkan perlindungan konsumen dan produsen melalui tertib hukum dan standarisasi mutu.

2. Sektor Pertanian dan Kehutanan

- a. Peningkatan produksi pertanian untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan nilai tambah pertanian melalui industri pengolahan hasil pertanian, pengembangan perdagangan dan pasar.
- b. Pengembangan usaha tani secara agribisnis.

- c. Peningkatan produksi peternakan untuk meningkatkan produktivitas ternak, khususnya peternak kecil guna mengentaskan kemiskinan, meningkatkan nilai tambah hasil peternakan dan menyediakan kebutuhan lokal.
- d. Terwujudnya pemanfaatan sumber daya perairan berbasis agribisnis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat perikanan.
- e. Optimalisasi sumber daya perikanan.
- f. Pembinaan dan pengawasan hutan.
- g. Mengembangkan peternakan untuk meningkatkan produktivitas ternak, khususnya peternak kecil guna mengentaskan kemiskinan, meningkatkan nilai tambah hasil-hasil peternakan dan menyediakan kebutuhan lokal.
- h. Mengembangkan usaha perikanan melalui pengembangan budidaya dan peningkatan produktivitas guna mengentaskan kemiskinan, meningkatkan nilai tambah hasil perikanan, memenuhi kebutuhan lokal dan ekspor.
- i. Memberdayakan dan mendayagunakan semua potensi yang dimiliki untuk akselerasi pembangunan menuju kearah pertumbuhan, pemeratan, kemajuan dan kemandirian dengan daya saing tinggi.
- j. Pemberdayaan masyarakat yang mencerminkan paradigma baru yang bersifat *people centered, partisipatory, empowering dan sustainable*.
- k. Peningkatan sarana dan prasarana ekonomi petani/RTP (nelayan) dengan teknologi baru tepat guna, dalam rangka peningkatan produktivitas, mutu dan kemasan produk hasil pertanian, peternakan dan perikanan.

- l. Penyelamatan hutan lindung sebagai aset produktif (obyek wisata hutan raya).
- m. Penataan ruang wilayah daratan dan wilayah pesisir pantai yang memberikan perlindungan dan pengamanan usaha agribisnis andalan ekonomi rakyat yang berkelanjutan (*sustainable*).

3. Sektor Pengairan

- a. Terdatanya sumber-sumber air baku untuk kebutuhan penyediaan air baku, meningkatnya penyediaan air baku bagi kebutuhan masyarakat.
- b. Meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat dan perkantoran untuk memenuhi kebutuhan air bersih yang diperoleh dari penyediaan air baku.
- c. Meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat dan perkantoran untuk memenuhi kebutuhan air bersih yang diperoleh dari penyediaan air baku.
- d. Meningkatkan pengamanan fasilitas umum dan fasilitas lainnya yang berada disekitar daerah tersebut.
- e. Meningkatnya cakupan layanan irigasi terhadap luas areal.
- f. Pengamanan terhadap fasilitas umum, rehabilitasi serta normalisasi curah hujan dalam rangka pengamanan terhadap banjir dan terlindunginya sumber daya air.

4. Sektor Tenaga Kerja

- a. Perluasan lapangan kerja sehingga mampu memberikan lapangan kerja kepada angkatan kerja baru dan sekaligus dapat mengurangi tingkat pengangguran. Perluasan lapangan kerja ini dapat dicapai dengan

mengusahakan agar pelaksanaan setiap program pembangunan menghasilkan lapangan kerja produktif semaksimal mungkin.

- b. Pembinaan dan pengembangan angkata kerja dengan pengembangan sistem pendidikan dan pelatihan yang mampu menghasilkan tenaga kerja dengan kualifikasi dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah.
- c. Pembinaan, perlindungan dan pengembangan angkatan kerja yang sudah bekerja dalam usaha meningkatkan produktivitas tenaga kerja.
- d. Meningkatkan fungsi pasar kerja sehingga penyaluran, penyebaran dan pemanfaatan tenaga kerja dapat dilaksanakan dengan lebih baik.
- e. Perencanaan tenaga kerja yang terpadu untuk mengurangi laju pertumbuhan serta meningkatkan mutu tenaga kerja, melalui berbagai usaha untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia.
- f. Pengembangan sumber daya manusia.
- g. Pengembangan kesejahteraan sosial.

5. Sektor Perdagangan, Usaha Daerah, Keuangan Daerah dan Koperasi

Sub Sektor Perdagangan

- a. Meningkatkan daya saing dalam rangka menghadapi pasar bebas melalui peningkatan mutu produksi kualitas dan efisiensi.
- b. Meningkatkan ekspor non migas dalam rangka meningkatkan devisa dan pendapatan daerah.
- c. Mengupayakan kelancaran arus barang dan jasa melalui peningkatan pelayanan dan koordinasi dunia usaha, asosiasi dan instansi terkait.

- d. Membangun kekuatan dan ketahanan ekonomi daerah yang berbasis ekonomi kerakyatan.
- e. Meningkatkan kemampuan usaha kecil dan menengah melalui perluasan lembaga-lembaga pendukung pengembangan usaha kecil dan menengah, dan meningkatkan daya saing dalam perdagangan ekspor dan import.
- f. Pengembangan kewirausahaan serta mendorong partisipasi aktif dalam memanfaatkan kesempatan berusaha untuk usaha kecil dan menengah, terutama dalam rangka peningkatan aktivitas perdagangan luar negeri.
- g. Lancarnya arus barang dan jasa dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dengan mutu yang lebih baik.

Sub Sektor Pengembangan Usaha Daerah

- a. Peningkatan kemampuan baik secara kelembagaan maupun dalam operasionalisasi.
- b. Pengembangan investasi yang mengarah pada sektor-sektor riil dan menyangkut hajat hidup orang banyak.

Sub Sektor Keuangan Daerah

- a. Pembinaan PAD dan kelembagaan
- b. Melaksanakan segala usaha dan kegiatan dalam menata manajemen keuangan daerah secara maksimum.
- c. Melaksanakan inventarisasi sumber pendapatan daerah sesuai dengan potensi yang ada.
- d. Melaksanakan penelitian dan evaluasi tata cara pemungutan pendapatan daerah yang efektif.

- e. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terutama wajib pajak bayar dalam memenuhi kewajibannya terutama dibidang pungutan daerah.
- f. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat atas produk-produk peraturan daerah yang menyangkut dengan pungutan pajak/retribusi.

Sub Sektor Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

- a. Pengembangan kewirausahaan dan daya saing PKMK.
- b. Berkembang dan bertambahnya usaha koperasi, meningkatnya semangat kewirausahaan dan kemandirian koperasi serta menurunnya biaya transaksi koperasi.
- c. Meningkatnya semangat kewirausahaan dan kemampuan/keterampilan usaha kecil dan menengah, terbentuknya jaringan bisnis usaha kecil dan menengah, dan semakin baiknya akses usaha kecil dan menengah terhadap sumber daya.
- d. Meningkatnya kemandirian pengusaha kecil dan menengah, meningkatnya jumlah usaha kecil dan menengah, dan menurunnya biaya transaksi usaha kecil dan menengah.
- e. Menumbuhkembangkan usaha koperasi dan UKM, meningkatkan semangat kewirakoperasian dan UKM.
- f. Meningkatnya kemandirian koperasi dan UMKM.
- g. Membukakan akses koperasi dan UKM terhadap sumber daya.

- h. Mengembangkan kegiatan-kegiatan dengan pola klaster terutama terhadap UKM dalam rangka menciptakan efisiensi dan sinergi kolektif; mengupayakan penurunan biaya transaksi koperasi dan UKM.
- i. Membangun jaringan bisnis usaha koperasi dan UKM.
- j. Mengembangkan jaringan informasi dan teknologi.
- k. Melakukan upaya-upaya perbaikan manajemen koperasi dan UKM.
- l. Melakukan upaya alih teknologi baik terhadap koperasi, maupun terhadap UKM.

6. Sektor Transportasi

Sub Sektor Prasarana Jalan dan Transportasi Darat

- a. Meningkatkan kondisi jaringan jalan, jumlah prasarana jalan yang terpelihara dan berfungsi, jumlah jaringan jalan, akses ke kawasan baru dan jumlah kapasitas angkut.
- b. Meningkatnya fasilitas jalan dan angkutan serta semakin lancarnya angkutan jalan raya, tersedianya jasa angkutan yang sesuai dengan kemampuan masyarakat.

Sub Sektor Transportasi Laut

- a. Pengembangan Kewirausahaan dan daya saing PKMK.
- b. Berkembang dan bertambahnya usaha koperasi, meningkatnya semangat kewirausahaan, dan kemandirian koperasi serta menurunnya biaya transaksi koperasi.
- c. Meningkatnya semangat kewirausahaan dan kemampuan/keterampilan usaha kecil dan menengah, terbentuknya jaringan bisnis usaha kecil dan

menengah, dan semakin baiknya akses usaha kecil dan menengah terhadap sumber daya.

- d. Meningkatkan kemandirian pengusaha kecil dan menengah, meningkatnya jumlah usaha kecil dan menengah, dan menurunnya biaya transaksi usaha kecil dan menengah.

7. Sektor Pertambangan dan Energi

Sub Sektor Pertambangan

- a. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengeksplorasi dan mengolah hasil pertambangan dan pengendalian usaha pertambangan yang terus berkelanjutan (*sustainable*).
- b. Penyesuaian kembali peraturan izin di bidang pertambangan di era otonomi daerah.
- c. Memberikan kemudahan dan mengaktifkan aparatur dan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam manajemen usaha pertambangan dan energi.
- d. Penataan dan pengendalian wilayah pertambangan energi.
- e. Mengembangkan keterkaitan usaha pertambangan dengan sektor lain.

Sub Sektor Industri

- a. Meningkatkan pembangunan jaringan listrik terutama ke daerah pedesaan, meningkatkan kapasitas terpasang listrik, serta dengan sasaran kebijakan adanya dukungan pengembangan sistem kelistrikan wilayah dan semakin banyak/luasnya kawasan yang terpasang jaringan listrik.

- b. Penyediaan sumber energi baik dalam bentuk listrik maupun sumber energi alternatif lainnya yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara murah dan merata ke seluruh wilayah dengan kualitas dan kuantitas yang memadai.

8. Sektor Pariwisata, Pos, Telekomunikasi dan Informatika

Sub Sektor Pariwisata

- a. Meningkatkan promosi pariwisata.
- b. Meningkatkan jumlah objek produk wisata dan usaha jasa wisata.

Sub Sektor Pos, Telekomunikasi dan Informatika

- a. Meningkatkan pembangunan jaringan telekomunikasi (telepon), terutama di kawasan-kawasan yang baru berkembang.
- b. Meningkatkan jumlah masyarakat yang memiliki telepon, serta dengan sasaran kebijaksanaan adanya dukungan pengembangan sistem telekomunikasi wilayah, semakin luasnya kawasan jangkauan telepon.

9. Sektor Pembangunan Daerah

- a. Memantapkan perwujudan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas daerah agar terselenggara pemerintahan yang baik, kinerja pelayanan umum yang efektif, efisien serta tumbuhnya prakarsa partisipasi masyarakat.
- b. Meningkatkan pengembangan potensi wilayah melalui kegiatan dan peembangan ekonomi daerah, pengembangan wilayah tertinggal, pengembangan dan penguatan landasan pembangunan yang berkelanjutan.

- c. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan dengan memperkuat lembaga dan organisasi masyarakat setempat, penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial masyarakat serta peningkatan keswadayaan masyarakat luas untuk membantu masyarakat dalam memperoleh dan memanfaatkan hak-haknya di bidang sosial, ekonomi dan politik.
- d. Mengembangkan kapasitas masyarakat melalui usaha peningkatan keterampilan dan pengetahuan, peningkatan sarana dan prasarana seperti modal, informasi pasar dan teknologi sehingga aka dapat memperluas kesempatan kerja dan memberikan pendapatan yang layak khususya bagi keluarga dan kelompok miskin.
- e. Mengembangkan sistem perlindungan sosial, terutama bagi masyarakat yang terkena dampak krisis ekonomi.
- f. Mengurangi berbagai bentuk peraturan yang menghambat masyarakat dalam mebangun lembaga dan organisasi, melakukan interaksi sosial dengan organisasi politik yang ada.
- g. Membuka ruang gerak yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses pengambilan publik melalui pengembangan forum lintas pelaku yang dibangun dan dimiliki oleh masyarakat setempat.
- h. Mengembangkan potensi masyarakat untuk membangun lembaga dan organisasi keswadayaan masyarakat, ditingkat lokal/daerah dalam rangka untuk memperkuat solidaritas dan ketahanan sosial masyarakat sehingga seluruh masalah kemasyarakatan secara mandiri.

10. Sektor Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Tata Ruang

Sub Sektor Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

- a. Melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan dan petunjuk teknis pembinaan dan pengendalian dampak lingkungan.
- b. Mempertahankan kelestarian potensi sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.
- c. Mengembangkan kelembagaan dan peran serta masyarakat serta kemampuan sumber daya manusia dalam mengembangkan teknologi pengelolaan lingkungan.

Sub Sektor Tata Ruang dan Pertanahan

- a. Pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya alam secara optimal dan seimbang.
- b. Memantapkan sistem perencanaan tata ruang dengan meningkatkan ketersediaan rencana tata ruang wilayah, kawasan perkotaan, kawasan pedesaan dan kawasan khusus yang dilaksanakan secara transparan, partisipasi dan sesuai dengan kondisi perencanaan.
- c. Menata kembali dan mengembangkan tata ruang wilayah Kota Tanjungpinang dan pembuatan Site Plan kawasan pemukiman kumuh dan kawasan pemukiman pelantar serta kawasan pesisir.
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dan sistem informasi pertanahan kepada masyarakat tentang status kepemilikan tanah.
- e. Meningkatkan pengembangan pertanahan yang serasi dengan rencana-rencana dan pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan.

- f. Meningkatkan kapasitas lembaga pengelolaan dan organisasi pertanahan.

11. Sektor Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga

- a. Mengupayakan pembinaan dan pengembangan lembaga pendidikan usia dini.
- b. Meningkatkan kemampuan akademik dan profesional serta kesejahteraan tenaga pendidikan.
- c. Melakukan pembaharuan pengembangan sistem pendidikan termasuk kurikulum.
- d. Memberdayakan lembaga pendidikan dalam dan luar sekolah sebagai pusat kegiatan belajar.
- e. Meningkatkan kuantitas dan kualitas lembaga pendidikan.
- f. Peningkatan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan IPTEK.
- g. Meningkatkan pembinaan pendidikan tinggi.
- h. Meningkatkan hubungan dengan dunia usaha dan dunia industri serta menggalakkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan.
- i. Mengembangkan nilai budaya lokal, khususnya budaya Melayu untuk memperkaya budaya nasional dan menangkal penetrasi budaya asing yang negatif melalui revitalisasi dan apresiasi kebudayaan.
- j. Menggali, memelihara, melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai seni budaya lokal untuk memperkaya khasanah budaya Melayu.

12. Sektor Kependudukan dan Keluarga Berencana

- a. Mengendalikan pertumbuhan penduduk, melalui program Keluarga Berencana (KB) mandiri.

- b. Menurunkan angka kematian khususnya kematian Balita, serta meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak serta lanjut usia.
- c. Mengendalikan arus migrasi penduduk melalui pelaksanaan dan penerapan peraturan Daerah.

13. Sektor Kesejahteraan Sosial, Kesehatan dan Pemberdayaan Perempuan

Sub Sektor Kesehatan

- a. Meningkatkan mutu pelayanan dan perluasan jangkauan pelayanan menuju kota sehat 2010.
- b. Meningkatkan pelayanan kesehatan, terutama pada masyarakat yang berpenghasilan rendah, meningkatkan kesejahteraan lingkungan serta mendorong kemandirian masyarakat dalam bidang kesehatan dan gizi.
- c. Mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, melalui peningkatan pembangunan dan kemampuan unit pelayanan kesehatan termasuk penyediaan tenaga kesehatan dan obat yang murah.
- d. Mendorong berkembangnya upaya pemeliharaan kesehatan masyarakat secara mandiri melalui program JPKM.
- e. Meningkatkan penyuluhan dan pemberantasan penyakit HIV/AIDS dan penyakit masyarakat sebagai akibat posisi Kota Tanjungpinang sebagai kota pariwisata, perdagangan dan industri.

Sub Sektor Kesejahteraan Sosial

- a. Meningkatkan usaha perbaikan kesejahteraan sosial masyarakat melalui optimalisasi pelayanan sosial dan bantuan sosial serta terus mendorong

peningkatan kesadaran, kemampuan dan rasa tanggung jawab masyarakat untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang dihadapi.

- b. Meningkatkan kesejahteraan sosial serta tanggung jawab sosial masyarakat melalui jalinan timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat.
- c. Menertibkan lokasi-lokasi yang dianggap rawan penyakit masyarakat seperti prostitusi, perjudian dan lain-lainnya secara terpadu dan berkesinambungan.
- d. Meningkatkan pembinaan organisasi sosial sebagai ujung tombak dalam menggerakkan penanganan masalah sosial terutama pada lapisan bawah.

Sub Sektor Pemberdayaan Perempuan

- a. Meningkatkan kemandirian, pengetahuan dan keterampilan serta peran aktif perempuan dalam pembangunan.
- b. Mewujudkan keluarga beriman/taqwa, sehat sejahtera dan bahagia dalam masyarakat.
- c. Perlindungan Tenaga Kerja Wanita (TKW).

14. Sektor Perumahan dan Pemukiman

Sub Sektor Perumahan dan Pemukiman

- a. Meningkatkan perbaikan perumahan dan pemukiman.
- b. Mengembangkan dan memantapkan sistem penyediaan hunian masyarakat berpendapatan rendah dan miskin yang bertumpu pada keswadayaan masyarakat.
- c. Meningkatkan pelayanan air bersih dan penyehatan lingkungan pemukiman.

- d. Meningkatkan kapasitas pelayanan jaringan sarana dan prasarana pemukiman skala lingkungan dan skala kota.
- e. Menyediakan sarana dan prasarana kota serta pelayanan umum untuk menciptakan keindahan, ketertiban dan kenyamanan.
- f. Meningkatkan institusi pembiayaan perumahan.
- g. Meningkatkan penataan kawasan dalam rangka pengendalian perkembangan dan kualitas pemukiman.
- h. Meningkatkan pengelolaan, pemanfaatan, pemugaran dan pelestarian kawasan strategi dan kawasan pemukiman tradisional.
- i. Menyediakan sarana dan prasarana kota serta pelayanan umum untuk menciptakan keindahan, ketertiban dan kenyamanan.

Sub Sektor Pembangunan Perkotaan

- a. Meningkatnya kapasitas organisasi masyarakat perkotaan, mengurangi penduduk miskin diperkotaan serta meningkatkan fungsi lembaga (organisasi) masyarakat perkotaan.
- b. Meningkatkan efisiensi pengelolaan pembangunan kota.
- c. Meningkatkan kerjasama antara Pemda, Perguruan Tinggi, LSM dan kelompok masyarakat lainnya untuk mengatasi masalah-masalah pembangunan kota atau masyarakat perkotaan.
- d. Meningkatkan partisipasi dalam perencanaan pembangunan kota dalam rangka menurunkan tingkat kejahatan perkotaan.
- e. Meningkatkan perbaikan pemukiman perkotaan.

- f. Rehabilitasi peningkatan dan pengembangan fasilitas sosial perkotaan, meningkatkan pembangunan dan pengembangan fasilitas umum perkotaan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

15. Sektor Agama

- a. Meningkatkan pembinaan kerukunan umat beragama melalui pembentukan jaringan kerja sama antar umat beragama.
- b. Membina partisipasi antar umat beragama dalam menciptakan suasana kondusif dalam pembangunan.
- c. Meningkatkan pelayanan kehidupan beragama dan peyempurnaan kualitas pelayanan haji.

16. Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Sub Sektor Pelayanan dan Pemanfaatan IPTEK

Meningkatkan peranan dan pengembangan IPTEK dalam mendorong kegiatan usaha dan memperjelas aturan main antar para pelaku IPTEK, termasuk dunia usaha; dan meningkatkan lalu lintas IPTEK (*Knowledge trafficking/flows*) guna mendorong interaksi antara penyedia informasi IPTEK dan pengguna.

Sub Sektor Penelitian dan Pengembangan IPTEK

Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi bangsa sendiri dalam dunia usaha, terutama usaha kecil, menengah, dan koperasi guna meningkatkan daya saing produk yang berbasis sumber daya lokal.

Sub Sektor Kelembagaan, Prasarana dan Sarana IPTEK

Meningkatkan penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk teknologi bangsa sendiri dalam dunia usaha, terutama usaha kecil, menengah, dan koperasi guna meningkatkan daya saing produk yang berbasis sumber daya lokal.

Sub Sektor Statistik

- a. Menyiapkan data dan informasi data statis maupun data dinamis.
- b. Menyediakan data-data dasar, data produk dan data (informasi) yang dibutuhkan baik untuk kegiatan pembangunan.
- c. Menata sistem pendataan (statistik) sehingga data yang diperoleh valid (tepat, akurat dan berkelanjutan).

17. Sektor Hukum

Sub Sektor Pembinaan Hukum Daerah

Meningkatkan supremasi hukum dengan memperbanyak produk-produk Perda oleh DPRD kota Tanjungpinang, independensi hukum dari berbagai pengaruh kekeusaan dan KKN,, terwujudnya aparatur daerah yang handal, bersih dan berwibawa, meningkatkan kemampuan aparturnya melalui pendidikan dan pelatihan, membina akhlak dan budi pekerti, pemberdayaan hukum kepada masyarakat, serta meningkatkan advokasi hukum bagi segmen strategis di Kota Tanjungpinang.

Sub Sektor Pembinaan Aparatur Daerah

- a. Mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak manapun.

- b. Menyelenggarakan proses peradilan secara cepat, mudah, murah dan terbuka serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan tetap menjunjung tinggi asas keadilan dan kebenaran dan menyelesaikan berbagai proses peradilan terhadap pelanggaran hukum dan HAM serta KKN yang belum ditangani secara tuntas.
- c. Mengembangkan budaya hukum aparatur daerah untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam rangka kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum.

18. Sektor Aparatur Pemerintah dan Pengawasan

Sub Sektor Aparatur Pemerintah

- a. Meningkatkan prasarana dan sarana kerja serta kesejahteraan aparatur.
- b. Pembinaan dan penyempurnaan tugas pokok (Tupoksi).
- c. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia.
- d. Pembinaan sistem pelayanan terpadu.
- e. Meningkatkan kesetiaan dan pengabdian aparatur pemerintah daerah mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.
- f. Meningkatkan kualitas aparatur melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan dan konsisten guna menghadapi tuntutan global yang sangat dinamis, kompetitif, akuntabilitas, transparansi dan demokratisasi.
- g. Meningkatkan upaya penertiban dan pengawasan terhadap aparatur untuk menciptakan pemerintahan yang efisien, efektif, profesional, berwibawa dan bersih dari unsur korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sub Sektor Pengawasan

- a. Penyalahgunaan sistem pengawasan dengan meningkatkan kualitas pengawasan.
- b. Meningkatkan peranan fungsi pengawasan oleh institusi pemerintah, lembaga kemasyarakatan maupun kontrol sosial dari lembaga legislatif.
- c. Pembinaan kualitas pengawasan.
- d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai aparat pengawasan dalam melaksanakan tugasnya.
- e. Meningkatkan dan menyebarluaskan sosialisasi peraturan perundang-undangan (Peraturan Daerah) untuk lembaga-lembaga aparatur maupun masyarakat umum.
- f. Melengkapi aparat/instansi pengawasan Pemerintah Kota Tanjungpinang dengan sarana dan prasarana pengawasan secara bertahap.

19. Sektor Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa

Sub Sektor Politik

- a. Terjadi perubahan orientasi dan perilaku kebijakan dari institusi pengambil keputusan yang bersikap penuh dengan “*Entrepreneurship* dan *Partnership*”.
- b. Mengurangi keterlibatan pemerintah dalam kegiatan pelayanan politik yang dapat ditangani oleh swasta.
- c. Pemerintah harus lebih responsif dan efisien serta selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

- d. Kompetisi yang sehat antara birokrasi pemerintah dengan sektor swasta dalam pelayanan publik.
- e. Terinstitusionalisasi sarana dan prasarana penerangan, komunikasi dan media massa sebagai wadah peningkatan kecerdasan masyarakat, memperteguh rasa kebersamaan dan berkeadilan, dalam usaha koridor untuk mewujudkan kepribadian bangsa yang bermartabat.

Sub Sektor Informasi dan Komunikasi

- a. Meningkatkan sistem informasi daerah untuk memenuhi kebutuhan informasi secara tepat, cepat, meluas dan terpadu.
- b. Mengoptimalkan pembangunan media komunikasi dan informasi untuk kepentingan pembangunan dan pemerintahan serta pelayanan pada masyarakat dan meningkatkan jangkauan pelayanan komunikasi, informasi dan media massa untuk mewujudkan kondisi yang kondusif bagi kehidupan pers dan media massa yang demokratis, berimbang, bermoral dan beretika sesuai dengan nilai-nilai budaya dan agama.
- c. Kompetisi yang sehat antara birokrasi pemerintah dengan sektor swasta dalam pelayanan publik.
- d. Institusionalisasi sarana dan prasarana komunikasi dan media massa sebagai wadah peningkatan kecerdasan masyarakat, memperteguh rasa kebersamaan dan berkeadilan dalam suatu koridor untuk mewujudkan kepribadian bangsa yang bermartabat.

20. Sektor Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

- a. Meningkatkan ketertiban masyarakat melalui peningkatan efektivitas aparat Kamtibmas baik di desa maupun perkotaan.
- b. Meningkatkan koordinasi antar instansi dalam penanganan setiap masalah ketertiban dan keamanan.
- c. Mendorong partisipasi masyarakat dalam mengatasi masalah ketertiban dan keamanan, melalui pengamanan swakarsa dan lingkungan.

3.4 Rencana Program Pembangunan di Kota Tanjungpinang

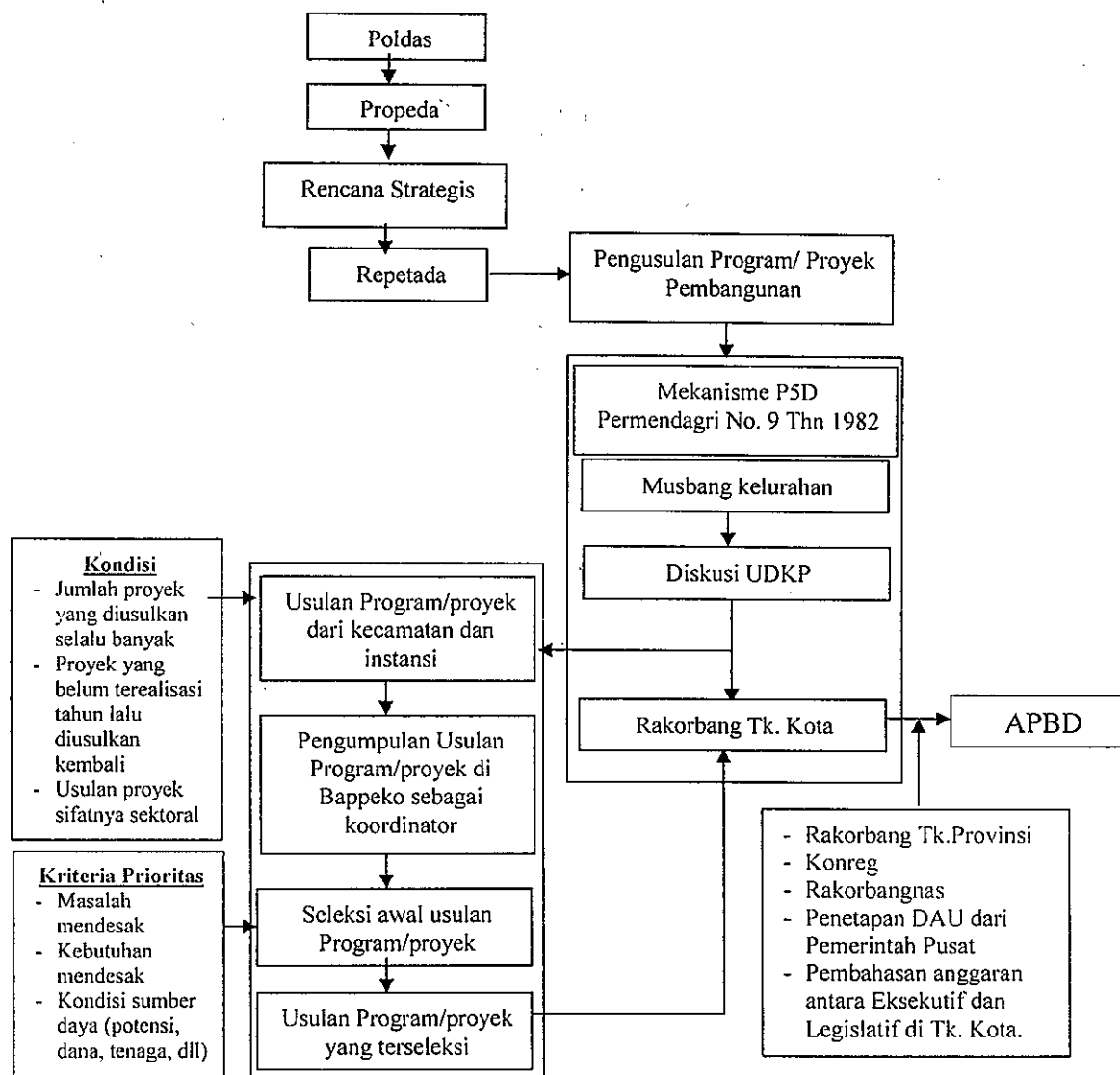
3.4.1 Proses Penyusunan Usulan Program Pembangunan

Mekanisme pengusulan program dan proyek di Kota Tanjungpinang masih mengikuti mekanisme yang ada dalam Permendagri No. 9 Tahun 1982 dimana dilakukan Musbang desa/kelurahan, diskusi UDKP dan Rakorbang tingkat Kota. Setelah diberlakukan undang-undang tentang otonomi daerah, terdapat sedikit perbedaan dalam proses pengusulan proyek terutama dalam peran serta masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat ini tidak hanya dalam bentuk keterlibatan dalam pengusulan proyek tetapi juga dalam hal pembiayaan proyek. Pemberlakuan sistem keuangan daerah juga mempengaruhi pada pembiayaan proyek yang akan dilaksanakan. Sistem anggaran yang berupa *block grant* dari pemerintah pusat mengharuskan pemerintah daerah secara bijaksana memanfaatkan dana tersebut untuk keperluan pembangunan.

Beberapa hal yang ditemukan dalam pelaksanaan Musbang desa/kelurahan sampai dengan diskusi UDKP adalah masih banyaknya proyek

yang diusulkan pada setiap tahunnya. Usulan proyek yang tidak dilaksanakan tahun yang bersangkutan akan diusulkan kembali pada tahun berikutnya sehingga usulan tersebut cenderung bersifat pengulangan. Kondisi ini tentu saja menimbulkan apriori dari masyarakat bahwa usulan yang diajukan tidak ditanggapi dengan baik oleh pengambil keputusan dan masyarakat tetap pesimis bahwa usulannya tidak akan terealisasi.

Bappeko sebagai instansi yang mengkoordinir pengusulan proyek ini juga mengalami kesulitan dalam menyikapi usulan masyarakat yang sangat banyak. Sehingga sebelum usulan tersebut masuk dalam pembahasan Rakorbang tingkat kota, maka dilakukan seleksi terhadap proyek-proyek yang diusulkan. Seleksi ini berdasarkan prioritas yang diusulkan oleh masing-masing instansi dan kecamatan sehingga memudahkan Bappeko untuk mengajukan proyek-proyek yang akan dibahas dalam forum Rakorbang. Dalam Gambar 3.1 diperlihatkan mekanisme perencanaan pembangunan tahunan (pengusulan proyek) yang terjadi Kota Tanjungpinang .



GAMBAR 3.1
MEKANISME PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH
DI KOTA TANJUNGPINANG

Sumber: Bappeko Tanjungpinang, 2005

3.4.2 Instansi Penyusun Usulan Program

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah (P5D) maka seluruh instansi baik bagian di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda), badan, kantor, dinas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan kecamatan merupakan instansi yang melakukan penyusunan usulan program di daerah. Instansi yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang dan tugas pokok yang diembannya adalah seperti terlihat pada Tabel III.1.

Adapun susunan organisasi Pemerintah Kota menurut Undang-Undang No. 22 tahun 1999 adalah :

a) Sekretariat Kota

Sekretariat Kota merupakan unsur staf Pemerintah Kota dipimpin oleh seorang Sekretaris Kota yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Sekretariat Kota terdiri dari Asisten, Bagian dan Sub Bagian.

b) Dinas Kota

Dinas Kota merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretariat Kota.

Dinas Daerah terdiri dari Bagian Tata Usaha dan Sub Dinas. Bagian Tata Usaha terdiri dari Sub Bagian dan Sub Dinas terdiri dari Seksi.

c) Lembaga Teknis Kota

Lembaga Teknis Kota merupakan unsur penunjang Pemerintah Kota yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Kota.

Lembaga Teknis Kota yang berbentuk badan terdiri dari Sekretariat dan Bidang. Sekretariat terdiri dari Sub Bagian dan Bidang terdiri dari Sub Bidang. Sedangkan Lembaga Teknis Kota yang berbentuk Kantor terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi.

TABEL III.1
INSTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
DAN TUGAS POKOKNYA

No.	Instansi	Tugas Pokok
I	Sekretariat Daerah	
1.	Asisten Bidang Pemerintahan	
	- Bagian Pemerintahan	Berkaitan dengan bidang tata pemerintahan, pertanahan dan otonomi daerah
	- Bagian Pemerintahan Desa	Berkaitan dengan bidang pemerintahan desa
	- Bagian Hukum	Perumusan dan penyusunan produk hukum, evaluasi dan pengkajian produk hukum, bantuan dan dokumentasi hukum
	- Bagian Hubungan Masyarakat	Pengumpulan dan pengolahan informasi, publikasi dan dokumentasi, hubungan antar lembaga/daerah
	- Bagian Organisasi	Pengolahan data, analisa dan formasi jabatan, kelembagaan dan ketatalaksanaan
2.	Asisten Bidang Sosial, Perekonomian dan Pembangunan	
	- Bagian Kesejahteraan Sosial	Berkaitan dengan bidang sosial, kesehatan&KB, mental spiritual, pendidikan dan kebudayaan, pemberdayaan masyarakat
	- Bagian Perekonomian	Berkaitan dengan sarana perekonomian, sarana produksi, sumber daya alam dan lingkungan hidup
	- Bagian Pengendalian Program	Penyusunan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program
3.	Asisten Bidang Umum	
	- Bagian Umum	Berkaitan dengan tata usaha, rumah tangga, sandi & telekomunikasi, protokol dan perjalanan dinas pimpinan, serta kepegawaian
	- Bagian Keuangan	Bertanggung jawab dalam bidang anggaran, perbendaharaan, pembukuan, verifikasi dan belanja pegawai
	- Bagian Perlengkapan	Analisa Kebutuhan, pengadaan dan distribusi barang serta pemeliharaan dan penggunaan aset daerah

II	Badan Daerah	
1.	Badan Pembangunan Daerah	Melaksanakan kewenangan bidang perencanaan daerah, sebagian bidang pengembangan otonomi daerah, sebagian bidang lain, sebagian bidang politik dalam negeri dan administrasi publik.
2.	Badan Pengawasan	Melaksanakan kewenangan sebagian pengembangan otonomi daerah dalam rangka mendukung tugas-tugas Pemda dalam pengawasan bidang pemerintahan, aparatur, perekonomian, pembangunan, pemberdayaan masyarakat serta pendapatan dan kekayaan daerah.
3.	Badan Kepegawaian Daerah	Melaksanakan kewenangan sebagian bidang politik dalam negeri dan pelaksanaan administrasi kepegawaian dan karier pegawai serta penyelenggaraan manajemen kepegawaian daerah
4.	Badan Pemberdayaan Masyarakat	Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi penguatan kelembagaan masyarakat desa/kelurahan, fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan fasilitasi pemberdayaan pemerintahan desa/kelurahan.
5.	Badan Bimas Ketahanan Pangan	Melaksanakan kewenangan sebagian bidang pertanian
III	Kantor Daerah	
1.	Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	Melaksanakan kewenangan sebagian bidang politik dalam negeri dan administrasi publik, meliputi kegiatan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, ketahanan bangsa, penyelamatan dari bencana, pengembangan demokratisasi, penyusunan program dan fasilitasi organisasi politik/kemasyarakatan, serta pelaksanaan dan koordinasi penanggulangan kerawanan bencana
2.	Kantor Penanaman Modal dan Promosi	Melaksanakan kewenangan bidang penanaman modal dan promosi
3.	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	Pelaksanaan dan pengkoordinasian fasilitasi ketentraman dan ketertiban serta penegakan Peraturan daerah serta pelaksanaan dan pengawalan pejabat/kepala daerah
4.	Kantor Arsip	Penyusunan rencana dan program bidang kearsipan
5.	Kantor Pengendalian Lingkungan Hidup	Melaksanakan kewenangan bidang lingkungan hidup
6.	Kantor Perpustakaan Umum Daerah	Melaksanakan kewenangan bidang perpustakaan
7.	Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil	Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pengendalian bidang kependudukan dan catatan sipil serta pelaksanaan fasilitasi administrasi kependudukan dan catatan sipil
8.	Kantor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Melaksanakan kewenangan bidang perkoperasian dan usaha kecil menengah
IV	Dinas Daerah	
1.	Dinas Pertanian	Melaksanakan kewenangan bidang pertanian, peternakan dan sebagian bidang kehutanan dan perkebunan
2.	Dinas Kelautan dan Perikanan	Melaksanakan kewenangan bidang kelautan dan sebagian bidang pertanian
3.	Dinas Kehutanan	Melaksanakan sebagian kewenangan bidang kehutanan dan perkebunan
4.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Melaksanakan kewenangan bidang perindustrian dan perdagangan
5.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Melaksanakan kewenangan bidang kepariwisataan dan sebagian bidang pendidikan dan kebudayaan
6.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Melaksanakan kewenangan bidang ketenagakerjaan dan

		sebagian bidang kependudukan khususnya terkait dengan sektor transmigrasi
7.	Dinas Kesehatan	Melaksanakan kewenangan bidang kesehatan
8.	Dinas Pendidikan	Melaksanakan sebagian bidang pendidikan dan kebudayaan serta bidang olahraga
9.	Dinas Pertanahan	Melaksanakan kewenangan bidang pertanahan dan penataan ruang
10.	Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah	Melaksanakan sebagian bidang permukiman dan sebagian bidang pekerjaan umum
11.	Dinas Perhubungan	Melaksanakan kewenangan bidang perhubungan
12.	Dinas Pendapatan	Melaksanakan kewenangan bidang pengembangan otonomi daerah dan sebagian bidang perimbangan keuangan
13.	Dinas Sosial	Melaksanakan kewenangan bidang sosial. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pengendalian kegiatan sosial, meliputi kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial dan bantuan sosial.
14.	Dinas Sumber Daya Alam	Melaksanakan kewenangan di bidang sumber daya alam

Sumber: Bappeko Tanjungpinang, 2005

BAB IV

ANALISIS RENCANA STRATEGIS DAN PENYUSUNAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI KOTA TANJUNGPINANG

4.1 Analisis Keterkaitan Instansi dengan Rencana Sektor

Dengan memperhatikan jenis program yang diusulkan setiap tahun oleh setiap instansi maka diperoleh keterkaitan antara instansi-institusi tersebut dengan ke-20 sektor pembangunan seperti terlihat pada Tabel IV.1

TABEL IV.1
KETERKAITAN INSTANSI DENGAN JENIS USULAN RENCANA SEKTORAL

[illegible]

terjadi pada tahun 2005. sedikitnya usulan pada tahun 2005 karena setiap instansi dan kecamatan diharuskan mengusulkan program yang benar-benar menjadi prioritas. Tabel IV.2 berikut ini akan memperlihatkan jumlah program dan proyek yang diusulkan dari seluruh instansi berdasarkan 20 sektor pembangunan dari tahun anggaran 2003 sampai dengan tahun anggaran 2005.

TABEL IV.2
JUMLAH USULAN PROGRAM DAN PROYEK PEMBANGUNAN
BERDASARKAN SEKTOR PEMBANGUNAN DARI TA. 2003 S.D. TA. 2005

No.	Sektor Pembangunan	Tahun Anggaran		
		2003	2004	2005
1.	Industri	12	7	2
2.	Pertanian dan kehutanan	18	14	5
3.	Sumber daya air dan irigasi	7	6	3
4.	Tenaga Kerja	88	18	28
5.	Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan daerah dan Koperasi	85	66	21
6.	Transportasi	50	83	17
7.	Pertambangan dan energi	5	2	2
8.	Pariwisata, pos dan telekomunikasi	15	16	7
9.	Pembangunan daerah dan transmigrasi	16	38	6
10.	Lingkungan hidup dan tata ruang	36	46	8
11.	Pendidikan, kebudayaan, kepercayaan terhadap Tuhan YME, Pemuda dan Olahraga	48	13	12
12.	Kependudukan dan Keluarga sejahtera	2	3	1
13.	Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan wanita, anak dan remaja	32	31	14
14.	Perumahan dan Permukiman	13	9	6
15.	Agama	5	9	1
16.	Ilmu pengetahuan dan teknologi	22	6	13
17.	Hukum	7	9	4
18.	Aparatur pemerintah dan Pengawasan	67	52	28
19.	Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media masa	22	4	8
20.	Keamanan dan Ketertiban Umum	2	1	2
Jumlah		433	608	188

Sumber: Bappeko Tanjungpinang, 2005

4.2 Analisis Pemanfaatan Renstra dalam Penyusunan Program Pembangunan

Rencana Strategis (Renstra) menjabarkan visi dan misi pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah dan Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kota Tanjungpinang Tahun 2003-2007 ke dalam bentuk program-program dan kegiatan pembangunan yang relevan dengan situasi, kondisi, permasalahan dan potensi yang ada selama lima tahun (2003-2007). Selain itu Renstra juga merupakan acuan utama bagi seluruh Dinas/Instansi dan masyarakat Kota Tanjungpinang dalam menyusun program-program dan kegiatan pembangunan selama lima tahun ke depan yang akan disusun ke dalam APBD Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2003-2007

Bagi Pemerintah Kota, Rencana Strategis merupakan salah satu kebijakan yang strategis. Dalam kajian ini, indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat pemanfaatan Rencana Strategis dalam penyusunan program pembangunan adalah dengan membandingkan program dengan arahan Rencana Strategis dan mengetahui persepsi dari setiap instansi pengusul program tentang digunakan atau tidaknya Rencana Strategis dalam proses penyusunan program pembangunan.

4.2.1 Membandingkan Program Pembangunan yang Ada dengan Rencana Strategis Kota Tanjungpinang

Ukuran yang digunakan adalah dengan membandingkan jumlah usulan program yang sesuai dengan arahan rencana strategis. Untuk tahun anggaran 2003 sampai dengan tahun anggaran 2005, sesuai atau tidaknya usulan program/proyek

dengan arahan Rencana Strategis ditinjau dari program/proyek yang tertuang dalam Renstra Kota Tanjungpinang.

Berdasarkan ukuran tersebut, maka diperoleh daftar program/proyek yang telah dikelompokkan berdasarkan masing-masing sektor yang diusulkan setiap instansi yang sesuai dengan Rencana Strategis selama 3 tahun terakhir yaitu mulai tahun anggaran 2003 sampai dengan tahun anggaran 2005. Program/proyek yang diusulkan setiap tahun oleh masing-masing instansi termasuk dalam 20 sektor pembangunan yang akan dibiayai oleh berbagai sumber pendanaan. Rekapitulasi persentase jumlah usulan program/proyek yang sesuai dengan Rencana Strategis pada setiap tahun anggaran dapat dilihat pada Tabel IV.3.

TABEL IV.3
JUMLAH USULAN PROGRAM/PROYEK YANG SESUAI DENGAN
RENCANA STRATEGIS KOTA TANJUNGPINANG

No.	Tahun Anggaran	Jumlah Usulan Program yang sesuai dengan Renstra	Jumlah Usulan	% program yang sesuai dengan Renstra
1.	2003	149	433	34,41
2.	2004	279	608	45,88
3.	2005	122	188	64,89
Rata-rata				48,39

Sumber: Hasil Analisis, 2005

Berdasarkan Tabel IV.3 terlihat bahwa secara rata-rata, hanya sebagian kecil (48,39%) program dan proyek yang diusulkan oleh instansi yang telah sesuai dengan Renstra Kota Tanjungpinang. Persentase program dan proyek yang sesuai dengan Renstra menunjukkan angka yang berfluktuasi dari tahun ke tahun, dengan persentase terbesar terjadi pada tahun 2005 yaitu sebesar 64,89% dan persentase terkecil pada tahun 2003 yaitu sebesar 34,41%.

Dalam program yang disusun oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi belum mengakomodasi adanya upaya untuk memperkuat struktur Indagkop dan PMD dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui; pengembangan kawasan industri, pengembangan dan pemasaran industri kecil dan terpadu, pengembangan koperasi sebagai Soko Guru perekonomian daerah, pengkajian prioritas pengembangan Indagkop dan PMD, serta memfasilitasi hubungan kemitraan antara pengusaha kecil, menengah, dan besar di sektor Indagkop. Masalah perlindungan konsumen dan produsen melalui tertib hukum dan standarisasi mutu juga belum masuk ke dalam program pembangunan yang ada.

Dalam sektor pertanian masih belum ada program dalam penataan ruang wilayah daratan dan wilayah pesisir pantai yang memberikan perlindungan dan pengamanan usaha agribisnis andalan ekonomi rakyat yang berkelanjutan (*sustainable*). Juga belum mengarah pada mewujudkan pemanfaatan sumber daya perairan berbasis agribisnis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat perikanan.

Pengembangan kewirausahaan dalam sektor perdagangan belum dapat mencerminkan suatu program yang diharapkan dalam mendorong partisipasi aktif dalam memanfaatkan kesempatan berusaha untuk usaha kecil dan menengah, terutama dalam rangka peningkatan aktivitas perdagangan luar negeri.

Masih adanya usulan yang tidak sesuai dengan arahan Rencana Strategis menunjukkan bahwa terdapatnya *informal planning* (seperti yang diistilahkan Briassoulis) dalam perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh instansi.

Kenyataan bahwa *informal planning* berjalan beriringan atau tergabung dengan *formal planning* memang selalu terjadi, karena terbukti dari tahun ke tahun persentase *informal planning* tersebut selalu ada dan malah justru usulan yang 'informal' tersebut yang dilaksanakan.

Lebih jauh, berdasarkan hasil wawancara di beberapa instansi disebutkan bahwa program/proyek yang berada di luar mekanisme pengusulan program/proyek selalu saja terjadi dalam bentuk alokasi untuk usulan yang berasal dari anggota legislatif atau program dari instansi pemerintah atasnya (dalam hal ini pemerintah pusat dan provinsi) yang tidak dikonsultasikan terlebih dahulu dengan pemerintah daerah. Sering pula proses *bottom-up* ini dikalahkan oleh superioritas rencana sektoral yang bersifat *top-down*, artinya dalam waktu yang sama pemerintah pusat melalui jalur departemen (sektoral) juga menyusun rencana pembangunan sektoral yang terutama nantinya akan dilaksanakan di daerah dengan sumber pendanaan APBN.

Untuk alasan yang pertama, berdasarkan hasil wawancara dengan Bappeko, diketahui bahwa anggota legislatif mempunyai porsi sebanyak 20% dari jumlah program dan proyek yang diusulkan untuk dapat direalisasikan. Selain itu, banyak keputusan yang lebih atas (dalam susunan organisasi pemerintahan) dari Bappeko mempengaruhi proses penyusunan usulan program maupun penentuan prioritas program yang akan dibahas dalam Rakorbang. Hal ini biasanya sulit diantisipasi, mengingat kekuatan Bappeko dalam hal ini relatif lemah. Misalnya, keputusan pelaksanaan program yang dikeluarkan langsung oleh Walikota dengan

alasan tertentu. Sekalipun secara formalitas hal ini dibahas terlebih dahulu dalam forum diskusi resmi, akan tetapi keputusan biasanya sudah dicapai sebelumnya.

Sedangkan untuk alasan kedua yang menyatakan bahwa program yang diusulkan merupakan program pemerintah tingkat atasnya (pusat atau provinsi) yang tidak dikonsultasikan dengan pemerintah daerah, sejak diberlakukannya otonomi daerah, bentuk program tersebut semakin berkurang karena pengelolaan program/proyek telah diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing kecuali program/proyek yang kewenangannya masih berada di tingkat nasional atau provinsi seperti jalan nasional dan jalan provinsi.

Walaupun demikian, usulan program yang telah sesuai dengan mekanisme pun seringkali tidak seluruhnya dapat direalisasikan mengingat adanya keterbatasan sumber daya terutama dalam hal pendanaan. Selain itu, besarnya jumlah dana tiap program/proyek yang diusulkan oleh setiap instansi ataupun kecamatan dapat juga mempengaruhi direalisasikan atau tidaknya usulan tersebut. Tetapi seringkali yang terjadi, program/proyek yang diusulkan berubah bentuk dan jumlah dana yang diusulkan jumlahnya berkurang karena adanya penyesuaian antara program yang diusulkan dari masyarakat melalui kecamatan dengan program yang diusulkan dinas serta adanya alokasi dana untuk program lain. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bappeko selaku koordinator penyusunan program, keterbatasan jumlah dana, terutama di era otonomi ini yang menerapkan sistem Dana Alokasi Umum yang mengharuskan pemerintah daerah mengalokasikan secara proporsional dana yang diterima untuk kegiatan rutin dan pembangunan, menyebabkan banyaknya usulan program yang tidak dapat

direalisasikan atau jumlah dana yang dialokasikan tidak sesuai dengan yang diusulkan.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa masih terdapat program dan proyek yang belum sesuai dengan yang diarahkan dalam Rencana Strategis Kota Tanjungpinang .

4.2.2 Persepsi Instansi Terhadap Penggunaan Renstra dalam Penyusunan Program Pembangunan

Penggunaan Renstra dalam penyusunan usulan rencana program pembangunan diketahui berdasarkan hasil survey primer berupa penyebaran kuesioner pada beberapa instansi yang berada di Kota Tanjungpinang. Untuk kebutuhan analisis, dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi serta karakteristik usulan program yang setiap tahun diusulkan oleh masing-masing instansi, maka diperoleh pengelompokan instansi sebagai berikut:

1. Instansi yang berada di lingkungan Sekretariat Daerah, Badan, Kantor, Dinas dan BUMN/BUMD, dikelompokkan menjadi:
 - a. Kelompok instansi yang berkaitan dengan pembangunan fisik, sebanyak 20 instansi, yang terdiri dari:
 - Sekretariat Daerah, sebanyak 2 bagian yaitu Bagian Pemerintahan dan Bagian Perekonomian. Kantor dan Badan Daerah, sebanyak 4 instansi yaitu Bappeko , Badan Bimas Ketahanan Pangan, Kantor Penanaman Modal dan Promosi, dan Kantor Pengendalian Lingkungan Hidup.

Dinas Daerah, sebanyak 12 instansi yaitu: Pekerjaan Umum, Pariwisata, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kesehatan, Pertanahan, Pendidikan, Perhubungan, Perindustrian, Sumber Daya Alam.

BUMN/BUMD, sebanyak 2 instansi yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN), dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

b. Kelompok instansi yang tidak berkaitan dengan pembangunan fisik, sebanyak 20 instansi yang terdiri dari:

- Sekretariat Daerah, sebanyak 9 bagian yaitu Bagian Umum, Hukum, Organisasi, Humas, Keuangan, Perlengkapan, Sosial, Pemerintahan dan Pengendalian Program.

- Kantor dan Badan Daerah, sebanyak 9 instansi yaitu Badan Pengawasan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, Satpol PP, Arsip Daerah, Perpustakaan Daerah, Kependudukan dan Catatan Sipil, dan Kantor Koperasi dan UKM.

Dinas Daerah, sebanyak 2 instansi yaitu: Dinas Sosial dan Dinas Pendapatan.

Berdasarkan pengelompokan tersebut, maka persepsi instansi tentang penggunaan Renstra sebagai salah satu kriteria dalam penyusunan usulan program dapat dilihat pada Tabel IV.4 berikut ini.

TABEL IV.4
PERSEPSI INSTANSI TERHADAP PENGGUNAAN RENSTRA DALAM
PENYUSUNAN USULAN PROGRAM PEMBANGUNAN

No.	Kelompok Instansi	Penggunaan Renstra		Jumlah
		Menggunakan	Tidak Menggunakan	
I.	Setda/Badan/Kantor/Dinas			
1.	Instansi yang berkaitan dengan pembangunan fisik	6 30,4% 15,9%	14 69,6% 36,4%	20 100,0% 52,3%
2.	Instansi yang tidak berkaitan dengan pembangunan fisik	1 4,8% 2,3%	19 95,2% 45,5%	20 100,0% 47,7%
Jumlah I		7 18,2% 18,2%	33 81,8% 81,8%	40 100,0% 100,0%

Sumber: Hasil Analisis, 2005

Keterangan: isian tiap sel

A : Jumlah

B : Persentase jumlah jawaban penggunaan Renstra terhadap jumlah tiap sub kelompok instansi

C : Persentase jumlah jawaban penggunaan Renstra terhadap jumlah tiap kelompok instansi

Berdasarkan Tabel IV.4 tersebut, dapat diketahui bahwa masing-masing karakteristik instansi menunjukkan kondisi yang hampir sama dimana sebagian besar instansi tidak menggunakan Renstra sebagai salah satu kriteria dalam penyusunan usulan program. Walaupun demikian, terdapat perbedaan dalam jumlah dan persentase instansi yang menggunakan maupun yang tidak menggunakan Renstra.

Untuk instansi yang berada di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda), Badan, Kantor dan Dinas, 33 dari 40 instansi atau sebesar 81,8% tidak menggunakan Renstra. Meskipun demikian, terdapat 7 instansi atau sebesar 18,2% instansi yang menggunakan Renstra. Lebih lanjut ditunjukkan bahwa instansi yang berkaitan dengan pembangunan fisik lebih banyak yang menggunakan Renstra dibandingkan dengan instansi yang tidak berkaitan dengan pembangunan fisik. Hal ini dapat diketahui bahwa 6 dari 20 instansi yang

berkaitan dengan pembangunan fisik atau sebesar 30,4% menggunakan Renstra dalam penyusunan usulan program. Sedangkan dalam kelompok instansi yang tidak berkaitan dengan pembangunan fisik, hanya 1 dari 20 instansi atau sebesar 4,8% saja yang menggunakan Renstra sebagai salah satu acuan penyusunan usulan program. Sehingga dapat diketahui disini bahwa untuk kelompok instansi yang berkaitan dengan pembangunan fisik, meskipun sebagian besar (69,6%) tidak menggunakan Renstra tetapi masih terdapat banyak (30,4%) yang menggunakan Renstra sebagai salah satu kriteria penyusunan. Sedangkan untuk kelompok instansi yang tidak berkaitan dengan pembangunan fisik, sebagian besar instansi (95,2%) memang tidak menggunakan Renstra dan hanya 4,8% yang menggunakan Renstra sebagai salah satu kriteria penyusunan usulan program. Sebagai instansi yang mengelola Dinas Kota seharusnya lebih memperhatikan Rencana Strategis karena menyangkut pelaksanaan program untuk mewujudkan visi dan misi Kota Tanjungpinang.

Penggunaan Renstra sebagai salah satu kriteria dalam penyusunan usulan program pembangunan di Kota Tanjungpinang dipengaruhi oleh beberapa alasan. Secara detail, persentase masing-masing alasan digunakan dan tidak digunakannya Renstra dalam penyusunan usulan program pembangunan dapat dilihat pada Tabel IV.5.

Alasan-alasan yang mempengaruhi penggunaan Renstra dalam penyusunan usulan program adalah bahwa bagi responden yang menggunakan Renstra (sebanyak 7 responden) menyatakan Renstra membantu dalam menentukan skala prioritas program yang akan diusulkan, Renstra memberikan

arahan dalam penentuan lokasi kegiatan dan adanya arahan bahwa Renstra harus digunakan dalam penyusunan usulan program. Alasan yang terbesar (41,7%) yang dinyatakan responden adalah bahwa Renstra membantu dalam penyusunan prioritas program dan proyek walaupun dari segi waktu pelaksanaan yang direncana dalam indikasi program Renstra banyak yang tidak sesuai.

TABEL IV.5
ALASAN RESPONDEN MENGGUNAKAN RENSTRA DALAM
PROGRAM PEMBANGUNAN

No.	Penggunaan Renstra	Alasan	Jumlah	Persentase
1.	Menggunakan	Adanya arahan bahwa Renstra harus digunakan dalam penyusunan usulan program/proyek	2	33,3
		Renstra membantu penyusunan prioritas program dan proyek	3	41,7
		Renstra memberikan arahan dalam penentuan lokasi kegiatan	2	25
		Jumlah menggunakan	7	100
2.	Tidak Menggunakan	Tidak ada ketentuan bahwa Renstra harus digunakan sebagai salah satu kriteria penyusunan usulan	4	11,4
		Renstra tidak memberikan tahapan pelaksanaan program dan arahan penggunaan lahan yang jelas	5	14,4
		Tidak menerima atau memiliki dokumen Renstra	8	22,8
		Renstra tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini	7	20
		Substansi Renstra terlalu umum	9	31,4
		Jumlah tidak menggunakan	33	100,0

Sumber: Hasil Analisis, 2005

Sedangkan bagi responden yang tidak menggunakan Renstra dalam penyusunan usulan program, alasan yang mempengaruhi adalah bahwa substansi Renstra masih terlalu umum, Renstra sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang terjadi, instansi tidak memiliki dokumen Renstra, Renstra tidak memberikan arahan lokasi yang jelas dan tidak adanya ketentuan bahwa Renstra harus digunakan dalam penyusunan usulan program. Alasan yang terbesar yang mempengaruhi penggunaan Renstra ini adalah substansi Renstra masih

terlalu umum (31,4%), instansi tidak memiliki dokumen Renstra (22,8%) dan Renstra sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang terjadi (20%).

Salah satu faktor kegagalan Rencana Strategis adalah terlalu lambatnya rencana dalam mengikuti perkembangan yang terjadi sebagai akibat dari jangka waktu perencanaan yang biasanya untuk prediksi jangka menengah sampai dengan jangka panjang. Sedangkan faktor kegagalan lain bahwa Rencana Strategis disusun dengan tidak memperhatikan ketersediaan sumber daya maupun implementasinya, tidak fleksibelnya arahan pemanfaatan Renstra, rasa memiliki seluruh aktor pembangunan terhadap Renstra, standar-standar yang diacu dalam penyusunan rencana tidak diterima oleh para aktor pembangunan dan para politisi yang membahas maupun yang mengesahkan Rencana Strategis tersebut memiliki perspektif jangka pendek. Jika dikaitkan dengan kondisi Otonomi Daerah sekarang ini, maka ada alasan lain yang menarik bahwa rencana yang diatur tidak memberikan kontribusi yang tinggi terhadap pendapatan daerah. Hal ini menarik karena pada era Otonomi Daerah ini, pemerintah daerah dituntut untuk lebih memberikan kontribusi pendapatan yang salah satunya dapat dilakukan melalui pajak dan retribusi daerah. Walaupun demikian, tidak dipungkiri bahwa kebutuhan masyarakat merupakan hal yang utama karena jika kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi maka secara tidak langsung kesejahteraan masyarakat akan meningkat dan kerelaan masyarakat untuk membayar sejumlah biaya atas pemakaian sejumlah fasilitas yang disediakan pemerintah akan semakin besar sehingga secara tidak langsung pula dapat meningkatkan pendapatan daerah.

4.3 Analisis *Restatement* Rencana Strategis dalam Penyusunan Usulan Program dan Proyek Pembangunan Daerah

Kenyataan yang menunjukkan bahwa ternyata Renstra sebagai salah satu kebijakan pembangunan yang memberikan arahan pembangunan yang merupakan penjabaran dari Pola Dasar Pembangunan Kota Tanjungpinang, tidak digunakan dalam penyusunan usulan program pembangunan. Hal ini tentunya terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan Rencana Strategis (Renstra) dalam penyusunan usulan program pembangunan yaitu pengetahuan terhadap keberadaan Renstra, pemahaman terhadap substansi/materi Renstra, perhatian instansi terhadap Renstra dalam penyusunan usulan program maupun alasan yang ditunjukkan dari masing-masing faktor tersebut. Selanjutnya, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ini merupakan kajian terhadap 33 responden yang tidak menggunakan Renstra dalam penyusunan usulan program pembangunan.

4.3.1 Pengetahuan Instansi Terhadap Keberadaan Renstra Kota Tanjungpinang

Salah satu faktor yang mempengaruhi penggunaan Renstra dalam penyusunan usulan program pembangunan adalah bahwa instansi mengetahui keberadaan Renstra Kota Tanjungpinang. Dengan mengetahui keberadaan Renstra minimal instansi telah mendapat gambaran yang jelas tentang Rencana Strategis khususnya yang berkaitan dengan bidang tugasnya. Tabel IV.6 akan memperlihatkan persepsi instansi berkaitan dengan pengetahuan terhadap keberadaan Renstra Kota Tanjungpinang.

Berdasarkan Tabel IV.6 dapat diketahui bahwa sebagian besar instansi (90,9%) mengetahui adanya Renstra Kota Tanjungpinang. Sedangkan sebesar 9,1% dari seluruh instansi yang tidak menggunakan Renstra dalam penyusunan usulan program, menyatakan tidak mengetahui adanya Renstra Kota Tanjungpinang tersebut.

TABEL IV.6
TINGKAT PENGETAHUAN INSTANSI TERHADAP
KEBERADAAN RENSTRA KOTA TANJUNGPINANG

No.	Kelompok Instansi	Pengetahuan thd keberadaan Renstra		Jumlah
		Mengetahui	Tidak Mengetahui	
I.	Setda/Badan/Kantor/Dinas			
1.	Instansi yang berkaitan dengan pembangunan fisik	12	2	14
2.	Instansi yang tidak berkaitan dengan pembangunan fisik	15	4	19
	Jumlah I	27	6	33

Sumber: Hasil Analisis, 2005

Dalam setiap kelompok instansi menunjukkan kondisi bahwa sebagian besar instansi menyatakan mengetahui adanya Renstra Kota Tanjungpinang. Dalam kelompok instansi di lingkungan Setda, Badan, Kantor, Dinas dan BUMN/BUMD diketahui bahwa sebanyak 27 dari 33 instansi yang tidak menggunakan Renstra dalam penyusunan usulan program menyatakan mengetahui keberadaan Renstra Kota Tanjungpinang. Sedangkan 6 dari kelompok instansi ini menyatakan tidak mengetahui adanya Renstra. Kelompok instansi yang terbanyak mengetahui adanya Renstra adalah justru instansi yang tidak berkaitan dengan pembangunan fisik. Sedangkan kelompok instansi yang berkaitan dengan pembangunan fisik lebih sedikit.

Dari 27 responden (92,3%) yang mengetahui adanya Renstra Kota Tanjungpinang menyatakan bahwa mereka mengetahui Renstra tersebut melalui sosialisasi yang dilakukan di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang. Lebih lanjut responden menyatakan bahwa bentuk sosialisasi ini dilakukan melalui penyampaian oleh Walikota atau Kepala Bappeko dalam forum-forum yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan. Tabel IV.7 memperlihatkan alasan responden dari masing-masing instansi yang mewakilinya yang berkaitan dengan pengetahuannya terhadap keberadaan Renstra.

TABEL IV.7
ALASAN RESPONDEN BERKAITAN DENGAN
PENGETAHUAN TERHADAP KEBERADAAN RENSTRA KOTA
TANJUNGPINANG

No.	Pengetahuan thd keberadaan Renstra	Alasan	Jumlah	Persentase
1.	Mengetahui	Sosialisasi	13	50,0
		Memiliki dokumen Renstra	1	3,3
		Terlibat pembahasan konsep Renstra	4	13,3
		Bidang pekerjaan berkaitan dengan Renstra	2	6,7
		Mengetahui dari pimpinan/rekan kerja	3	10
		Mencari tahu sendiri ke Bappeko	1	3,3
		Mengetahui dari buku Perda	1	3,3
		Pernah bekerja di Bappeko	1	3,3
		Jumlah mengetahui	27	100,0
2.	Tidak Mengetahui	Tidak pernah ada sosialisasi	4	66,7
		Tidak memiliki dokumen Renstra	2	33,3
		Tidak memiliki kepentingan dengan Renstra	0	0
		Jumlah tidak mengetahui	6	100,0

Sumber: Hasil Analisis, 2005

Berdasarkan Tabel IV.7 tersebut diketahui bahwa adanya sosialisasi dan keterlibatan responden pada pembahasan Renstra merupakan 2 (dua) alasan terbesar responden mengetahui keberadaan Renstra dimana masing-masing besarnya adalah 50% dan 13,3% dari jumlah responden yang mengetahui keberadaan Renstra. Sedangkan 2 dari 3 instansi jumlah responden yang tidak

mengetahui adanya Renstra memberikan alasan bahwa mereka tidak mengetahui adanya Renstra karena tidak pernah ada sosialisasi tentang Renstra. Sedangkan alasan lainnya adalah karena instansi tempat responden bekerja tidak memiliki dokumen Renstra (33,3 %).

Terjadi adanya kontradiksi alasan bahwa responden yang menyatakan mengetahui adanya Renstra diperoleh melalui sosialisasi Renstra, sedangkan bagi responden yang tidak mengetahui adanya Renstra justru menyatakan bahwa tidak pernah dilakukan sosialisasi mengenai Renstra. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa sosialisasi yang telah dilakukan tidak menyebar dan merata ke seluruh instansi dan ke seluruh aparatur karena masih ada instansi yang belum mengetahui adanya Renstra Kota Tanjungpinang.

4.3.2 Pemahaman Instansi Terhadap Materi Renstra Kota Tanjungpinang

Salah satu ciri Rencana Strategis yang baik adalah dapat dipahami oleh para calon penggunanya. Oleh karena itu, selain faktor pengetahuan terhadap adanya Renstra, pemahaman terhadap materi Renstra menjadi kebutuhan yang tidak kalah pentingnya. Berikut ini akan dilakukan analisis terhadap besarnya tingkat pemahaman responden terhadap isi materi Renstra.

TABEL IV.8
PERSEPSI INSTANSI TERHADAP
PEMAHAMAN MATERI RENSTRA KOTA TANJUNGPINANG

No.	Kelompok Instansi	Pemahaman terhadap materi Renstra		Jumlah
		Memahami	Tidak Memahami	
1.	Instansi yang berkaitan dengan pembangunan fisik	3	9	12
		21,4%	78,6%	100,0%
		10,0%	36,7%	46,7%
2.	Instansi yang tidak berkaitan dengan pembangunan fisik	2	13	15
		12,5%	87,5%	100,0%
		6,7%	46,3%	53,3%
Jumlah		5	22	27
		16,7%	83,3%	100,0%
		16,7%	83,3%	100,0%

Sumber: Hasil Analisis, 2005

Berdasarkan Tabel IV.8 tersebut, dari 27 responden yang mengetahui adanya Renstra Kota Tanjungpinang, sebanyak 22 responden atau 83,3 % menyatakan tidak mengerti dengan isi materi dalam Renstra. Instansi-instansi yang tidak berkaitan dengan pembangunan fisik lebih banyak yang tidak mengerti dengan materi Renstra dibandingkan dengan instansi yang berkaitan dengan pembangunan fisik. Hal ini berarti pula bahwa Renstra lebih banyak dimengerti oleh instansi yang berkaitan dengan pembangunan fisik, ditunjukkan dengan persentase 21,4% dari instansi yang berkaitan dengan pembangunan fisik yang lebih besar dibandingkan dengan jawaban dari instansi yang tidak berkaitan dengan pembangunan fisik yaitu sebesar 12,5%.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa secara umum Renstra tidak banyak dimengerti oleh responden yang berasal dari instansi di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang, terbukti dengan masih banyaknya (83,3%) responden yang tidak memahami terhadap materi Renstra.

Jika pengetahuan responden terhadap adanya Renstra dikaitkan dengan pemahaman responden terhadap materi dalam Renstra maka akan terlihat seperti pada Tabel IV.9.

TABEL IV.9
KETERKAITAN PENGETAHUAN RESPONDEN TERHADAP ADANYA
RENSTRA DENGAN PEMAHAMAN TERHADAP MATERI RENSTRA

		Pemahaman terhadap Renstra				Total	
		Memahami Renstra		Tidak Memahami Renstra			
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Pengetahuan thd adanya Renstra	Mengetahui	7	21,2	20	69,7	27	90,9
	Tidak Mengetahui	0	0,0	6	9,1	6	9,1
Jumlah		7	21,2	26	78,8	33	100,0

Sumber: Hasil Analisis, 2005

Jumlah responden yang mengetahui dan memahami isi materi Renstra sebanyak 7 atau sebesar 21,2%. Sedangkan yang tidak mengetahui dan tidak memahami Renstra sebanyak 6 responden atau sebesar 9,1%..

4.3.3 Perhatian Instansi Terhadap Renstra Kota Tanjungpinang

Faktor lain yang mempengaruhi penggunaan Renstra sebagai salah satu pertimbangan dalam penyusunan usulan program adalah perhatian instansi terhadap Renstra dalam menyusun dan mengusulkan program dan proyek. Dengan memperhatikan Renstra diasumsikan bahwa instansi berupaya untuk mensinkronkan usulan rencana program dengan rencana strategis.

TABEL IV.10
PERHATIAN INSTANSI TERHADAP RENSTRA DALAM
PENYUSUNAN USULAN PROGRAM PEMBANGUNAN

No.	Kelompok Instansi	Persentase perhatian instansi terhadap Resntra dalam penyusunan usulan program		Jumlah
		Memperhatikan	Tidak Memperhatikan	
1.	Instansi yang berkaitan dengan pembangunan fisik	12 68,7% 30,6%	8 31,3% 13,9%	20 100,0% 44,4%
2.	Instansi yang tidak berkaitan dengan pembangunan fisik	2 25,0% 13,9%	18 75,0% 41,7%	20 100,0% 55,6%
Jumlah		14 44,4% 44,4%	26 55,6% 55,6%	40 100,0% 100,0%

Sumber: Hasil Analisis, 2005

TABEL IV.11
KETERKAITAN PERHATIAN INSTANSI TERHADAP RENSTRA DENGAN
PENGUNAAN RENSTRA DALAM PENYUSUNAN USULAN PROGRAM
PEMBANGUNAN

		Penggunaan Renstra				Total	
		Menggunakan		Tidak Menggunakan			
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Perhatian terhadap Renstra	Memperhatikan	7	15,4	7	26,9	14	42,3
	Tidak Memperhatikan	0	0,0	26	57,7	26	57,7
Jumlah		7	15,4	33	84,6	40	100,0

Sumber: Hasil Analisis, 2005

Instansi yang tidak memperhatikan Renstra dalam proses penyusunannya sebagian besar (57,7% dari jumlah seluruh instansi) tidak menggunakan Renstra tersebut dalam penyusunan usulan program pembangunan di instansinya. Sebesar 26,9% dari jumlah seluruh instansi menyatakan memperhatikan Renstra dan tidak menggunakan Renstra tersebut dalam penyusunan usulan program. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa sebagian kecil instansi memperhatikan Renstra dalam proses penyusunan usulan program, dan sebagian besar tidak menggunakan Renstra dalam penyusunan usulan program tersebut.

Jika pengetahuan terhadap keberadaan Renstra, pemahaman terhadap materi Renstra dan perhatian instansi terhadap Renstra dalam penyusunan usulan program dikaitkan tingkat pendidikan, maka diperoleh kondisi sebagai berikut:

- Setiap tingkatan pendidikan sebagian besar menyatakan mengetahui adanya Renstra. Bahkan untuk tingkat pendidikan S2, tidak ada satupun responden yang tidak mengetahui adanya Renstra Kota Tanjungpinang. Faktor pengetahuan terhadap adanya Renstra ini terkait dengan adanya sosialisasi Renstra.

- Responden pada setiap tingkatan menyatakan sebagian besar tidak mengerti terhadap materi Renstra Kota Tanjungpinang .
- Responden pada setiap tingkatan pendidikan menyatakan bahwa sebagian besar tidak memperhatikan Renstra dalam penyusunan usulan programnya.

Berdasarkan uraian tersebut diketahui bahwa tingkat pendidikan tidak mempengaruhi pada faktor pengetahuan akan adanya Renstra, pemahaman terhadap materi Renstra dan faktor perhatian terhadap Renstra dalam penyusunan usulan program pembangunan karena tidak terdapat perbedaan tanggapan terhadap ketiga faktor ini. Oleh karena itu, diperlukan adanya pengembangan kemampuan bagi para aparatur pemerintah daerah untuk meningkatkan kemampuan perencanaan dan pengelolaan pembangunan daerah.

4.4 Pemanfaatan Rencana Strategis dalam Penyusunan Usulan Program Pembangunan di Kota Tanjungpinang

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka diketahui bahwa Renstra Kota Tanjungpinang tidak digunakan oleh sebagian besar instansi dalam penyusunan usulan program dan proyek pembangunan yang setiap tahun dilaksanakan. Faktor yang diteliti yang diduga mempengaruhi tidak digunakannya Renstra adalah faktor **pengetahuan** terhadap adanya Renstra, **pemahaman** terhadap materi Renstra dan **perhatian** terhadap Renstra dalam proses penyusunan usulan program. Jika pengetahuan terhadap adanya Renstra dan pemahaman terhadap materi Renstra dikaitkan dengan penggunaan Renstra tersebut dalam penyusunan usulan program.

TABEL IV.12
KETERKAITAN PENGETAHUAN TERHADAP ADANYA RENSTRA,
PEMAHAMAN TERHADAP MATERI RENSTRA DAN PERHATIAN
TERHADAP RENSTRA DENGAN PENGGUNAAN RENSTRA DALAM
PENYUSUNAN USULAN PROGRAM PEMBANGUNAN

			Penggunaan Renstra				Jumlah	
			Menggunakan		Tidak Menggunakan			
			Jml	%	Jml	%	Jml	%
Mengetahui	Paham	Memperhatikan	7	17,5	5	12,50	12	30
		Tidak Memperhatikan	0	0,0	0	0	0	0
	Tidak Paham	Memperhatikan	0	0,0	2	5	2	5
		Tidak Memperhatikan	0	0,0	20	50	20	50
Tidak Mengetahui	Paham	Memperhatikan	0	0,0	0	0	0	0
		Tidak Memperhatikan	0	0,0	0	0	0	0
	Tidak Paham	Memperhatikan	0	0,0	0	0	0	0
		Tidak Memperhatikan	0	0,0	6	15	6	15
Jumlah			7	17,5	33	82,5	40	100

Sumber: Hasil Analisis, 2005

Berdasarkan analisis terdapat 6 (enam) karakteristik instansi dalam kaitan dengan penggunaan Renstra dalam penyusunan usulan program pembangunan, yaitu:

1. Instansi yang mengetahui adanya Renstra, tidak mengerti terhadap materi Renstra, memperhatikan Renstra tetapi tidak menggunakan Renstra tersebut dalam penyusunan usulan program pembangunan. Karakteristik instansi ini merupakan yang terbesar yaitu sebanyak 42,3% instansi yang berada di Kota Tanjungpinang.
2. Instansi yang mengetahui adanya Renstra, tidak mengerti dan tidak memperhatikan Renstra sehingga tidak menggunakan Renstra dalam penyusunan usulan program. Jumlah instansi dengan karakteristik ini adalah

sebanyak 16,7% dari seluruh instansi dan kecamatan yang ada di Kota Tanjungpinang.

3. Instansi yang mengetahui, mengerti dan memperhatikan Renstra serta menggunakan Renstra tersebut dalam penyusunan usulan program, sebanyak 15,4% dari seluruh jumlah instansi dan kecamatan yang berada di Kota Tanjungpinang.
4. Instansi yang mengetahui, mengerti dan memperhatikan Renstra tetapi tidak menggunakan Renstra tersebut sebagai salah satu pertimbangan dalam penyusunan usulan program. Jumlah instansi ini sebanyak 15,4% dari seluruh jumlah instansi.
5. Instansi yang tidak mengetahui, tidak mengerti dan tidak memperhatikan Renstra sehingga tidak menggunakan Renstra dalam penyusunan usulan program, sebanyak 7,7% dari seluruh instansi dan kecamatan yang berada di Kota Tanjungpinang.
6. Instansi yang mengetahui, mengerti tetapi tidak memperhatikan Renstra dan tidak menggunakan Renstra tersebut dalam penyusunan usulan program, sebanyak 2,5% dari seluruh instansi dan kecamatan.

Beberapa hal yang menarik dalam karakteristik tersebut adalah:

1. Tidak semua instansi yang telah mengetahui, mengerti dan memperhatikan Renstra secara langsung menggunakan Renstra tersebut penyusunan usulan program pembangunan karena setengah dari kelompok instansi yang memiliki karakteristik tersebut ternyata tidak menggunakan Renstra sebagai salah satu pertimbangan dalam penyusunan usulan program. Hal ini tentunya terkait

dengan alasan-alasan yang dikemukakan responden bahwa substansi Renstra masih terlalu umum.

2. Instansi yang tidak mengetahui Renstra langsung menyatakan tidak menggunakan Renstra tersebut dalam penyusunan usulan program.
3. Renstra tidak cukup hanya diketahui dan diperhatikan dalam penyusunan usulan program, tetapi perlu juga dimengerti substansinya sehingga Renstra dapat digunakan untuk keperluan tersebut. Kondisi ini justru yang dijumpai di Kota Tanjungpinang di mana Renstra tidak digunakan dalam penyusunan usulan program bukan karena tidak tahu dan tidak diperhatikan, tetapi karena Renstra tidak dimengerti oleh responden yang mewakili instansinya yang memiliki pengalaman dalam penyusunan usulan program tahunan.

Alasan-alasan yang berkaitan dengan penggunaan Renstra oleh instansi dan kecamatan dalam penyusunan usulan program adalah:

1. Renstra digunakan karena:
 - Renstra membantu dalam menyusun prioritas program dan proyek.
 - Adanya arahan bahwa Renstra harus digunakan dalam penyusunan usulan program/proyek (prosedur).
 - Renstra memberikan arahan dalam penentuan lokasi kegiatan dan program yang diusulkan memerlukan pertimbangan lokasi yang diarahkan Renstra.
 - Adanya sosialisasi tentang Renstra.
 - Instansi memiliki dokumen Renstra.
 - Instansi terlibat dalam pembahasan Renstra.
 - Bidang pekerjaan berkaitan dengan Renstra.

- Renstra bersifat informatif.
- Substansi Renstra jelas dan uraian disertai dengan peta.

2. Renstra tidak digunakan karena:

- Substansi Renstra masih terlalu umum.
- Instansi tidak menerima atau memiliki dokumen Renstra.
- Renstra tidak diketahui oleh sebagian instansi karena tidak ada sosialisasi secara khusus tentang Renstra.
- Renstra tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga Renstra menjadi tidak operasional, dalam arti bahwa arahan kegiatan dan indikasi pelaksanaan program kalah cepat dengan perkembangan yang terjadi.
- Renstra tidak memberikan tahapan pelaksanaan yang jelas.
- Tidak adanya ketentuan bahwa Renstra harus digunakan sebagai salah satu kriteria penyusunan usulan.
- Program dan proyek yang diusulkan tidak diatur dalam Renstra karena sifat program yang non fisik.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Beberapa temuan yang diperoleh dari hasil pengolahan dan analisis data seperti tersebut di atas, antara lain adalah:

1. Program/proyek pembangunan yang telah sesuai dengan arahan dalam Rencana Strategis Wilayah Kota Tanjungpinang selama kurun waktu 3 tahun yaitu dari tahun anggaran 2003 sampai dengan tahun 2005 rata-rata sebesar 35,27%. Angka ini menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil saja usulan program/proyek yang sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra Kota Tanjungpinang). Walaupun demikian, dapat dikatakan juga bahwa program/proyek yang diusulkan telah sesuai dengan Renstra walaupun rata-rata persentasenya selama 3 tahun hanya 35,27%.
2. Sebagian besar (84,6%) yang berada di Kota Tanjungpinang tidak menggunakan Renstra dalam penyusunan usulan program pembangunan, dan sebanyak 15,4% yang menggunakan Renstra dalam penyusunan usulan program. Alasan yang banyak dinyatakan adalah bahwa substansi Renstra masih terlalu umum (27,3%), instansi tidak menerima atau memiliki dokumen Renstra (25,8%), dan Renstra tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini (22,7%).
3. Pengetahuan terhadap keberadaan Renstra dan perhatian terhadap Renstra ternyata tidak mempengaruhi penggunaan Renstra dalam penyusunan usulan program pembangunan karena meskipun sebagian besar telah mengetahui

adanya Renstra (92,3%) dan memperhatikan Renstra (73,1%), tetapi sebagian besar pula tidak menggunakan Renstra tersebut dalam penyusunan usulan program pembangunan. Kondisi menunjukkan bahwa sebesar 83,3% menyatakan tidak menggunakan Renstra dalam penyusunan usulan. Sedangkan sebesar 78,9% menyatakan tidak menggunakan Renstra tersebut sebagai salah satu kriteria penyusunan usulan.

4. Pemahaman terhadap materi Renstra mempengaruhi penggunaan Renstra dalam penyusunan usulan program pembangunan karena meskipun mengetahui keberadaan Renstra dan memperhatikan Renstra tersebut tetapi tidak memahami materi Renstra menyebabkan Renstra tidak digunakan sebagai salah satu kriteria penyusunan usulan program.

5.2 Rekomendasi

Beberapa rekomendasi yang dapat dikemukakan berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Memperbaiki kualitas Renstra agar dapat dimanfaatkan dalam penyusunan usulan program pembangunan dan agar Renstra tersebut benar-benar dapat dioperasionalisasikan yang dapat dilakukan dengan cara merevisi Renstra yang sekarang berlaku. Perbaikan kualitas Renstra ini dapat dimulai dengan perbaikan dalam proses pembuatan rencana tersebut yang harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:
 - Pelibatan semua aktor pembangunan pada tahap persiapan rencana maupun pada proses pembuatan rencana

- Penggunaan data yang akurat dan teknik analisis yang baik sehingga menghasilkan rencana yang memberikan alokasi sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan lebih operasional.
2. Mensosialisasi Renstra Kota Tanjungpinang kepada seluruh instansi dan kecamatan yang dilakukan secara intensif dan kontinu (terus menerus) berupa:
 - penyebarluasan dokumen rencana.
 - publikasi kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, papan informasi, buku rencana yang dicetak khusus untuk konsumsi masyarakat dan dunia usaha.
 - pameran pembangunan.
 3. Memberikan prioritas yang lebih tinggi kepada usulan program/proyek yang sesuai dengan Renstra.
 4. Melaksanakan pelatihan yang menyangkut pengetahuan dan wawasan mengenai Renstra kepada seluruh aparatur instansi di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang maupun kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Bryant, Carolie dan Louise G. White. 1987. *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang*. Terjemahan Rusyanto L. Simatupang. Jakarta: LP3ES.
- Conyers, Diana. 1994. *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar*. Terjemahan: Susetiawan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Diaz, Hiran D. 1983. *Manual for Training in Rural Development Planning*. Bangkok: AIT.
- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Terjemahan Samodra Wibawa et al. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dusseldorp, Van. 1980. *Framework For Regional Planning in Developing Countries*. Wageningen: International Institute for Land Reclamation and Improvement.
- ESCAP. 1979. *Guidelines for Rural Centre Planning*. New York: United Nations.
- Foley, Donald. 1967. *An Approach to Metropolitan Spatial Structure*. Pennsylvania: University Of Pennsylvania Press.
- Friedman, John. 1987. *Planning In The Public Domain: From Knowledge to Action*. Princenton: Princenton Univ. Press.
- Greed, Clara. 1996. *Implementing Town Planning: The Role of Town Planning in The Development Process*. London: Longman.
- Healey, P., A. Khakee, A. Motte & B. Needleham (Eds). 1995. *Making Strategic Spatial Plans: Innovation in Europe*. London, UCL Press.
- Hirschman, Albert O. 1973. *Development Project Observed*. Washington DC: The Brooking Institutions.
- Kartasmita, Ginandjar. 1996. *Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: CIDES.

-1997. *Administrasi Pembangunan: Perkembangan Pemikiran dan Prakteiknya di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Kiddper, Louise. 1981. *Research Method in Social Relation*. Rinehart and Winston.
- Kunarjo. 1992. *Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
-2002. *Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Miles, Matthew B dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metoda-Metoda Baru*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Munir, Badrul. 2002. *Perencanaan Pembangunan Daerah, Dalam Perspektif Otonomi Daerah*. NTB: Badan Penerbit Bappeda Prop NTB.
- Nurmandi, Achmad. 1999. *Manajemen Perkotaan: Aktor, Organisasi dan Pengelolaan Daerah Perkotaan di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Lingkaran Bangsa.
- Oetomo, Andi. 1998. *Administrasi Perencanaan*. Bahan Pra Pascasarjana Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Bandung.
- Rapoport, Amos. 1980. *Human Aspects-In Urban Forum-Towards a Man Environment Aproach to Urban Form and Design*. Oxford: Pergoman International Library Of Science, Technology Engineering and Social Science.
- Ripley, Randall B. 1985. *Bureaucracy, Politics and Public Policy*. Boston: Little Brown and company.
- Singarimbun, Masri. 1995. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES.
- Sujarto, Djoko. 1985. *Beberapa Pengertian tentang Perencanaan Fisik*. Jakarta: Bhratara.
-1990. *Proses dan Metode Perencanaan Tata Ruang Wilayah Yang Tanggap terhadap Dinamika Pembangunan Daerah*. Bandung: Jurusan Teknik Planologi FTSP Institut Teknologi Bandung.

- Taylor, John L dan David G Williams. 1982. *Urban Planning Practice in Developing Countries*. London: Pergamon Press.
- Tjahjati, Budhi. 1997. *Bunga Rampai Perencanaan Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1996. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.
- Weiss, Carol H. 1972. *Evaluation Research*. New Jersey: Prentice Hall Inc.
- Wetzling, W. 1978. *Spatial Planning*. London: Hutchinson Of London.

ARTIKEL

- Kiprah. 2001. "Kiprah Rencana Tata Ruang dalam Pembangunan Perkotaan". *Kiprah*, no. 2 Tahun I, November, hal. 22.
- Anwar, Affendi dan Setia Hadi. 1996. "Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan". *Prisma*, Nomor Khusus 25 Tahun Prisma 1971-1996, hal. 57.
- Balbo, Marcello. 1993. "Urban Planning and The Fragmented City of Developing Countries". *TWPR* 15 (1), p. 23.
- Briassoulis, Helen. 1997. "How the Others Plan: Exploring the Shape and Forms of Informal Planning". *Journal of Planning Education and Research*, no. 17, pp. 105-117.
- Davidson, Forbes. 1996. "Planning for Performance: Requirements for Sustainable Development". *Habitat International*, vol. 20, no. 3, pp. 445-462.
- Patta, Johny. 1995. "Rencana Tata Ruang: Dokumen Hukum yang Siap Diimplementasikan". *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, no. 18, April, hal. 32-34.
- Rakodi, Carole. 2001. "Forget Planning, Put Politics First? Priorities for Urban Management in Developing Countries". *Journal of Applied Geoinformation Sciences*, vol. 3, hal. 209-221.
- Soejarto, Djoko. 1992. "Wawasan Tata Ruang". *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, Edisi Khusus Juli, hal. 3-8.
- Soetrisno, Loekman. 1988. "Negara dan Peranannya dalam Menciptakan Pembangunan Desa yang Mandiri". *Prisma*, no. 1, Januari.

Wheaton, W. 1974. "A Comparative Static Analysis Of urban Spatial Structure"..
Journal of Economic Theory, hlm. 223-237.

MAKALAH DALAM SEMINAR

Indrawati, Sri Mulyani. 1994. *Permasalahan Sistem dan Strategi Perencanaan Pembangunan Daerah*. Disampaikan dalam Seminar Nasional Perencanaan Pengembangan Wilayah Kabupaten Dati II dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia. Kerjasama Jurusan Planologi FTSP-ITB & GTZ, Bandung.

Ngoedijo, Widjono. 2002. *Suatu Pendekatan Penilaian Kebutuhan Pengembangan Kemampuan Perencanaan Pembangunan Daerah*. Disampaikan dalam Seminar Pemikiran dan Praktek Perencanaan dalam Era Transformasi di Indonesia. Bandung: Departemen Teknik Planologi ITB.

PERATURAN

Undang-undang Republik Indonesia No. 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Kota Tanjungpinang Tahun 2003-2007